



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI
DAN BIDANG PELAYANAN UMUM TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Disusun Oleh :

KHARISMA ZAHRA DINILLAH

C1A020103

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kharisma Zahra Dinillah

Nomor Mahasiswa : C1A020103

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli karya penulis, selama proses penulisan tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan diarsipkan dengan kaidah ilmiah penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana pada poin (1), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 13 Agustus 2024

Yang membuat Pernyataan



Kharisma Zahra Dinillah

C1A020103

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

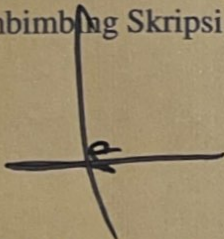
Dengan ini, Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Kharisma Zahra Dinillah
Nomor Mahasiswa : C1A020103
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Komprehensif dan Skripsi pada tanggal seperti yang tertera dibawah ini.

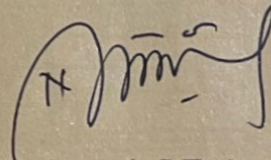
Jambi, 13 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr. Siti Hodijah, S.E., M.Si.
NIP.197010141995122002

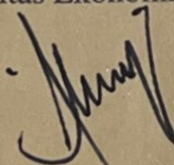
Pembimbing Skripsi II



Dr. Nurhayani, S.E., M.Si.
NIP.198006212009122002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



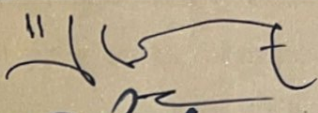
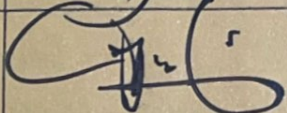
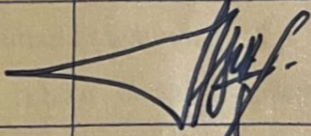
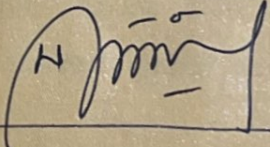
Dr. Etik Umiyati, S.E., M.Si.
NIP.196807091993032002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

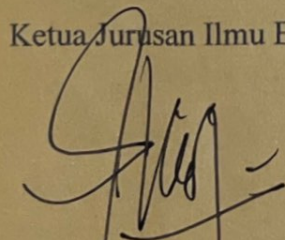
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juli 2024
Jam : 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

TIM PENGUJI SKRIPSI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	Selamet Rahmadi S.E., M.Si.	
Penguji Utama	H. Parmadi, S.E., M.E.	
Sekretaris	Dwi Hastuti, S.E., M.Sc.	
Anggota	Dr. Siti Hodijah, S.E., M.Si.	
Anggota	Dr. Nurhayani, S.E., M.Si.	

Disahkan Oleh :

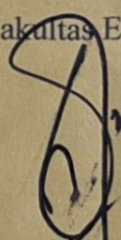
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Dr. Rafiqi, S.Ag., MA.

NIP. 197802282005011003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si.

NIP. 196603011990032002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah membentangkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan, bantuan, sumbangan pemikiran, dukungan moral, dan doa yang diterima. Segala bentuk bantuan tersebut memiliki nilai yang sangat bermakna bagi penulis. Dalam peluang kali ini, penulis berkeinginan menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada semua yang terlibat:

1. Allah SWT, berkat hidayah, nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menuntaskan penyusunan skripsi ini sebagaimana mestinya.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua saya selaku *support system* paling penting yaitu Ibu Romah Susila dan Bapak Sunaryo yang selalu mendoakan dengan tulus dan ikhlas, melimpahkan kasih sayang, menyemangati tiada henti, memotivasi serta inspirasi pada penulis sepanjang penulis menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membanggakan.
3. Bapak Prof. Dr. Helmi., S.H., M.H selaku Rektor Universitas Jambi
4. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
5. Ibu Dr. Etik Umiyati, S.E., M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
6. Ibu Dr. Siti Hodijah, S.E., M.Si dan Dr. Nurhayani S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermakna, termasuk masukan, saran, arahan, pengetahuan tambahan, nasehat, solusi dan rela menyisihkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan arahan pada penulis dalam menuntaskan

penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT melindungi beliau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah menyumbangkan banyak ilmu serta pengetahuan pada penulis sepanjang menempuh studi.
8. Kepada Beni Saputra, S.H. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, pikiran maupun materi kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi Meisya, Putri, Amanda, Leni dan Rina yang mendukung, menyemangati, memberi masukan serta bantuan sejak awal penulis masuk universitas sampai tahapan penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu mendengar keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT dikarenakan telah menganugerahkan sahabat terbaik seperti kalian.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2020

Serta berbagai pihak yang tidak mampu dituliskan satu persatu baik dengan langsung ataupun tidak langsung. Semoga bantuan dan partisipasi akan diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadar akan sepenuhnya bahwasanya skripsi ini masih jauh dari ketidaksempurnaan baik dari segi teknis ataupun isi, atas dasar itu penulis menghendaki adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun supaya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi mampu mendatangkan kegunaan bagi orang banyak dan semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya.

Jambi, 13 Agustus 2024

Kharisma Zahra Dinillah
C1A020103

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan dan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel tahun 2017-2023 dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana dengan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 sebesar 31,30 persen, dan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 sebesar 13,60 persen. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi data panel memperoleh temuan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi,
Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Government Expenditures in the Economic Sector and Public Services Sector on Regency/City Economic Growth in Jambi Province". This research aims to determine and analyze the development and influence of government spending in the economic sector and public services on the economic growth of districts/cities in Jambi Province. This research uses panel data regression analysis for 2017-2023 and 11 districts/cities in Jambi Province.

The development of government expenditure in the economic sector and the field of public services fluctuates every year, with the average development of government expenditure in the economic sector of districts/cities in Jambi Province in 2017-2023 amounting to 31.30 percent, and the average development of government expenditure in the field of public services districts/cities in Jambi Province in 2017-2023 amounted to 13.60 percent. The results of research using panel data regression found that government expenditure variables in the economic sector and public services sector have a significant effect on the economic growth of districts/cities in Jambi Province in 2017-2023.

Keywords: Economic Growth, Government Expenditures in the Economic Sector, Government Expenditures in the Public Services Sector

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah.....	18
2.1.5 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	21
2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian	28
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi	28
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.3 Penelitian Terdahulu	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	35
2.5 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Data dan Sumber Data	37

3.1.1 Jenis Data	37
3.1.2 Sumber Data.....	37
3.2 Metode dan Alat Analisis Data	37
3.2.1 Analisis Deskriptif	37
3.2.2 Analisis Regresi Data Panel.....	38
3.2.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	39
3.2.4 Pengujian Model Regresi Data Panel	40
3.2.5 Pengujian Asumsi Klasik.....	41
3.2.6 Pengujian Hipotesis	43
3.3 Operasional Variabel	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	46
4.1 Penduduk.....	46
4.2 PDRB Kabupaten/Kota	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ekonomi, Bidang Pelayanan Umum dan Pertumbuhan Ekonomi.....	53
5.1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	53
5.1.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	55
5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	59
5.2.1 Pemilihan Model Terbaik	59
5.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	62
5.2.3 Hasil Persamaan Regresi Data Panel REM	65
5.2.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil	71
5.2.5 Implikasi Kebijakan	74
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023 (Persen)	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022.....	47
Tabel 4.2	Kontribusi PDRB Kabupaten/kota Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas Terhadap Total PDRB Tahun 2017-2022 (persen)	50
Tabel 4.2	Kontribusi PDRB Kabupaten/kota Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Terhadap Total PDRB Tahun 2017-2022 (persen)	51
Tabel 5.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023	54
Tabel 5.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023	56
Tabel 5.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (persen)	57
Tabel 5.4	Hasil Uji Chow	60
Tabel 5.5	Hasil Uji Hausman	61
Tabel 5.6	Hasil Uji Langrange Multiplier	61
Tabel 5.7	Hasil Uji Multikolineartitas.....	63
Tabel 5.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 5.9	Analisis Data Panel Model Terbaik	65
Tabel 5.10	Nilai Konstanta Kabupaten/kota di Provinsi Jambi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017-2023	7
Gambar 2. Rata-Rata Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2023.....	8
Gambar 3. Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4. Hasil Uji Normalitas	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2016).

Tentunya dalam hal ini pemerintah pusat berperan sebagai pemangku kepemimpinan Negara Indonesia, dimana pembangunan merupakan pemicu dan pemacu dari pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah dengan secara adil dan merata di berbagai wilayah Indonesia, dan yang menjadi salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional merupakan ukuran yang paling sering digunakan sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan total output suatu perekonomian. Dengan melihat output tumbuh lebih cepat dari penduduk, output perkapita bertambah dan standar kehidupan meningkat (Case & Fair, 2015).

Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga hampir semua daerah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Adapun indikator pertumbuhan

ekonomi yaitu pendapatan perkapita, pendapatan nasional, kenaikan kesempatan kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan (Suhada Deksa et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam merancang pembangunan ekonomi suatu wilayah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan fisik wilayah serta interaksinya dengan wilayah lain, artinya tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku merata di seluruh daerah. Di sisi lain, salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang daerah adalah pemahaman akan pentingnya teori bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan telah dirangkum pada model-model pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah (Hasan & Muhammad, 2018).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan suatu daerah dalam suatu periode tertentu yaitu dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, dimana untuk menghasilkan pendapatan masyarakat maupun nilai tambah dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi yang positif ditandai dengan meningkatnya kinerja perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif ditunjukkan dengan menurunnya kinerja perekonomian dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang sedang mengembangkan sarana dan prasarana di berbagai sektor untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Setiap daerah termasuk Provinsi Jambi, mempunyai banyak permasalahan yang perlu diselesaikan. Salah satu permasalahannya adalah ada pada pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, perekonomian Provinsi Jambi mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi yaitu -0,51 persen. Pandemi Covid-19 telah membuat arah dan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi berubah. Dibawah ini merupakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan pada kabupaten/kota yang ada Provinsi Jambi dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 2017-2023 (Persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Jambi	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66
Batanghari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,70
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,66
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	6,28
Sarolangun	4,68	4,80	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,02
Tanjab Barat	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,51
Tanjab Timur	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,30	6,30	4,50
Kota Jambi	4,68	5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36	6,61
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	4,92

Sumber: Badan Statistik Provinsi Jambi 2024

Tabel 1.1 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 mengalami fluktuatif. Dimana laju pertumbuhan yang paling rendah di Provinsi Jambi pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,51 persen sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,13 persen. Dengan data ini dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sejak 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen. Sedangkan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,34 persen, penurunan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi paling besar terjadi pada tahun 2019 hingga 2020 sebanyak -4,86 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebanyak 4,2 persen dan secara beruntun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021-2022 Provinsi Jambi terjadi kenaikan kembali yaitu 1,44 persen, sedangkan tahun 2022-2023 Provinsi Jambi pada laju pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebanyak -0,47 persen. Inilah yang menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu terpenting dalam penganalisisan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah yaitu dengan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi peran pemerintah sangat penting sebagai sosok strategis untuk melakukan berbagai kebijakan melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah. Terdapat dua jenis kebijakan yang dapat pemerintah lakukan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan terkait dengan hal yang akan menjadi pengaruh pada tingkatan suku bunga serta uang beredar dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan dengan adanya pengeluaran pemerintah adalah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah atau dalam hal ini belanja pemerintah berada di posisi yang paling strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat menggunakan langkah-langkah kebijakan untuk menyelamatkan situasi di mana ekonomi memburuk karena terjadinya resesi.

Salah satu indikator perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yaitu besaran pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran atau belanja pemerintah (Rauf Dedy Abdur, 2017). Pengeluaran pemerintah merupakan indikator besarnya kegiatan pemerintah, apabila semakin banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, namun ini bukanlah berarti bahwa pengeluaran pemerintah harus selalu ditingkatkan tanpa memperhitungkan aspek efisiensinya. Dengan demikian, pemerintah perlu memprioritaskan efisiensi alokasi sumber daya di berbagai daerah sehingga mereka dapat merencanakan anggaran yang tepat dan mendorong pembangunan daerah. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dikarenakan pengeluaran pemerintah ini akan dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah (PAD). APBD ini merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Kesia Dumais et al., 2022).

Jumlah pengeluaran pemerintah yang proporsional akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Lubis Effendy, 2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2016 terkait Pedoman Pengolahan

Keuangan Daerah menyatakan, klasifikasi belanja menurut bidang/fungsinya digunakan bertujuan bagi keselarasan serta keterpaduan pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 9 bidang, yaitu diantaranya pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

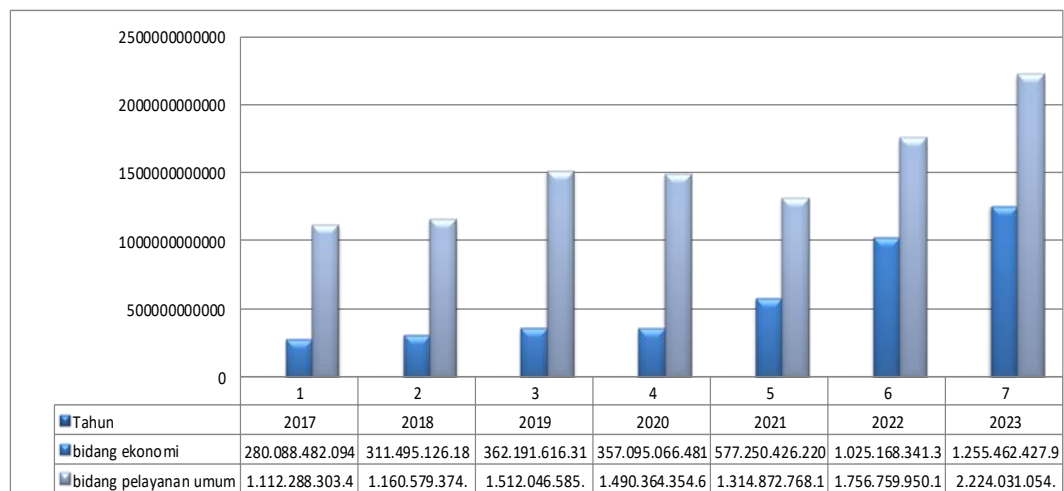
Dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi merupakan salah satunya. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi (Yuliana et al., 2023). Sesuai dengan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan program yang terkait dengan perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, dan usaha kecil dan menengah (UKM), tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pengairan, bahan bakar dan , energi, pertambangan, industri, dan konstruksi, transportasi, telekomunikasi, dan informatika, penelitian, dan pengembangan ekonomi.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum. Pengeluaran bidang pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Yayat, 2017).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik, kegiatan ini harus terlaksana sesuai dengan aspirasi dan permintaan seluruh warga negara dan warga demi peningkatan pelayanan publik. Selain itu, upaya ini juga untuk menonjolkan tugas dan hak setiap warga negara serta mengakui akuntabilitas negara dan korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pemberian pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Pembatasan hukum diperlukan untuk melindungi seluruh warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan ketika melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 yaitu tentang klasifikasi belanja pada bidang pelayanan umum yaitu lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan dan fiskal, serta urusan luar negeri, bantuan luar negeri, pelayanan umum, penelitian dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), utang pemerintah, pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pelayanan umum pemerintah lainnya.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian, kebutuhan akan berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas manusia semakin meningkat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dalam berbagai bidang. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik yang diperlukan. Dengan cakupan pelayanan publik yang luas peran infrastruktur menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Ahmad et al., 2023).

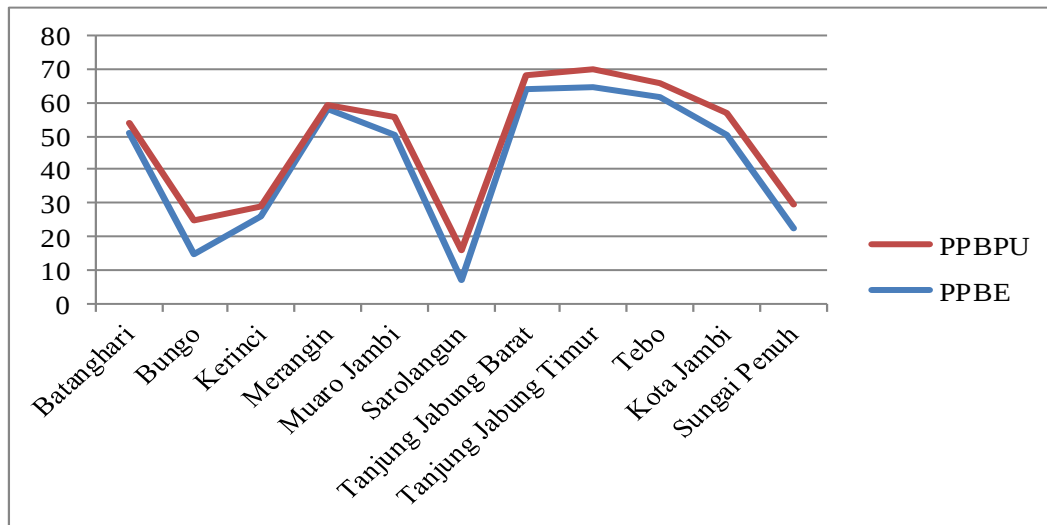
Belanja pada bidang ekonomi merupakan suatu hal yang tentunya menjadi sangat penting. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum diukur oleh anggaran belanja bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dialokasikan pada setiap daerah. Pada gambar 1.1 yang menunjukkan gambaran pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum Provinsi Jambi tahun 2017-2023.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2024

Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Berdasarkan gambar 1 pada pengeluaran bidang ekonomi dan pelayanan umum Provinsi Jambi dengan jangka waktu selama tujuh tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat pada gambar bahwasanya belanja bidang ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan belanjanya, namun pada tahun 2020 belanja bidang ekonomi mengalami penurunan cukup besar yaitu sebanyak 5 milyar rupiah, di tahun 2021 bidang ekonomi ini mengalami peningkatan belanja dari tahun sebelumnya yaitu meningkat sebanyak 220 milyar rupiah, selanjutnya di tahun 2022 belanja bidang ekonomi terjadi peningkatan yang paling tinggi yaitu sebanyak 467 milyar rupiah, begitu selanjutnya di tahun 2023 belanja bidang ekonomi Provinsi Jambi kembali mengalami peningkatan 230 milyar rupiah. Pada belanja bidang pelayanan umum dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2017-2018 terjadi peningkatan sebanyak 48 milyar rupiah, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan pengeluaran pemerintah yaitu sebanyak 352 milyar rupiah. Selanjutnya tahun 2020 terjadi kembali penurunan pengeluaran sebanyak 22 milyar rupiah, begitu selanjutnya pada tahun 2021 terjadi kembali penurunan pengeluaran pemerintah yang cukup besar yaitu sebanyak 176 milyar rupiah dan pengeluaran pemerintah kembali meningkat sebanyak 468 milyar rupiah.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2024

Gambar 2. Gambar Rata-Rata Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Berdasarkan gambar 2 rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, daerah yang memiliki tingkat rata-rata perkembangan yang tertinggi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 64,86 persen, hal tersebut dikarenakan terjadinya peningkatan yang sangat besar di tahun 2022, dimana peningkatan tersebut mencapai 463,71 persen, besarnya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi disebabkan karena pemerintah ingin menggerakkan sektor ekonomi yang di mulai dari perdagangan, pengembangan usaha, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Pada rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum, daerah dengan rata-rata perkembangan tertinggi yaitu Kabupaten Bungo sebesar 10,10 persen. Besarnya rata-rata perkembangan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang besar pada bidang pelayanan umum yaitu sebesar 13,95 persen. Besarnya peningkatan tersebut digunakan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta melalui

lembaga eksekutif dan legislatif, keuangan, fiskal serta urusan luar negeri dan pembangunan daerah.

Anggaran pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan dari tahun 2017-2023, yang tentunya menunjukkan situasi yang baik dari segi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum. Dengan meningkatnya belanja pada dua bidang tersebut tidak berbanding lurus dengan atau diikuti oleh laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan perekonomian semestinya terus meningkat seiring dengan peningkatan belanja atau pengeluaran pemerintah. Terutama pada tahun 2023 belanja bidang ekonomi dan pelayanan umum mengalami peningkatan yang cukup besar, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan cukup signifikan.

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan belanja pemerintah pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu, belum terserap secara merata, dan alokasi belanja serapan belanja pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum yang belum sesuai dan sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya seiring dengan permasalahan yang timbul akan memperlambat perkembangan perekonomian suatu daerah yang berguna untuk tersedianya pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan terjadinya fluktuasi pengeluaran pemerintah pada bidang pelayanan umum, dalam hal ini tentunya menggambarkan situasi mengenai pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dan pelayanan umum untuk meningkatkan perekonomian. Namun, peningkatan belanja tersebut tidak berbanding lurus atau mengikuti laju pertumbuhan perekonomian daerah. Semestinya jika pengeluaran pemerintah meningkat maka terjadi pula peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya

seiring dengan permasalahan yang timbul akan memperlambat perkembangan perekonomian suatu daerah yang berguna untuk tersedianya pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah dari satu tahun tertentu di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi peran pemerintah sangat penting sebagai sosok strategis untuk melakukan kebijakan melalui alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah, khususnya pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum. Apabila semakin besar kegiatan pemerintah yang memprioritaskan efesiensi alokasi belanja atau pengeluaran pemerintah yang tepat dalam melaksanakan roda perekonomian maka, dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah yang proporsional akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil kesimpulan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada Tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan pengetahuan mengenai pengaruh terkait pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan baru kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, khususnya pada bidang pengeluaran pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi wacana kegiatan perekonomian untuk mengarahkan pada meningkatnya barang dan jasa yang di produksi masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Laju pertumbuhan ekonomi digambarkan sebagai alat ukur untuk mengendalikan pembangunan dan perkembangan ekonomi dari satu periode ke periode selanjutnya (Sukirno, 2011). Defenisi pertumbuhan ekonomi menurut Kunzet adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang di perlukan (Jhingan, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses peningkatan pendapatan nasional rill, dimana seluruh struktur ekonomi yang berkegiatan di suatu daerah atau suatu negara mengalami peningkatan output dalam periode tertentu. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kemakmuran dalam jangka panjang, ditunjukkan dengan meningkatnya output per kapita yang secara bersamaan menawarkan lebih banyak alternatif dalam konsumsi barang dan jasa sehingga diikuti oleh meningkatnya daya beli masyarakat (Sri Hartati, 2021).

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi menandakan keadaan sosial ekonomi daerah semakin berkembang. Kuznets dalam

(Todaro, 2000) mengemukakan enam ciri-ciri atau proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

- a. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- b. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi, khususnya produktifitas tenaga kerja.
- c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
- d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
- e. Negara-negara berkembang dan negara maju secara ekonomi cenderung merambah bagian-bagian dunia lain sebagai pasar dan sumber bahan baku.
- f. Penyebaran pertumbuhan ekonomi internasional yang terbatas, hanya mencapai sepertiga penduduk dunia.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2023 untuk mengukur tampilan perekonomian nasional digunakan indikator agregat ekonomi yang dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka PDRB yang disajikan dari tahun ke tahun dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, perkembangan pendapatan serta sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Produk domestik bruto (PDRB) secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa pada tahun tersebut dan disisi lain PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk menentukan kapasitas, pergeseran, dan struktur perekonomian suatu wilayah.

2. Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga pada tahun tertentu dan disisi lain PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak terpengaruh oleh faktor harga.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$R(t-1, t) = \frac{PDRB_t - (PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (2.1) \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

$R(t-1, t)$: Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$: Nilai PDRB tahun ini

$PDRB_{t-1}$: Nilai PDRB tahun sebelumnya

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada Sukirno, (2015) dijelaskan beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith yang secara garis besar mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu luas tanah, jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, dan teknologi yang digunakan.
- b. Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah.
- c. Kenaikan upah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.
- d. Tingkat keuntungan adalah faktor penentu besarnya pembentukan modal, jika tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
- e. Pertambahan penduduk dapat menaikkan pendapatan perkapita, akan tetapi jika penduduk sudah semakin banyak, tanpa diiringi dengan kemajuan teknologi maka, hukum hasil tambahan akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lamban pertumbuhannya.

2. Teori Sollow

Menurut Sollow pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Teori pertumbuhan Sollow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik (tabungan dan investasi) dan tenaga kerja (pertumbuhan penduduk). Sedangkan teknologi yang mengasumsikan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual. Tingkat teknologi ini memberikan penjelasan mengenai interaksi antara kedua faktor input yaitu modal dan tenaga kerja. Teknologi dalam hal ini merupakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan atau menghasilkan sesuatu secara efisien. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai dengan adanya penggunaan input kapital dan tenaga kerja yang efisien. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi kapital yang merupakan kunci utama untuk mencapai pertumbuhan optimal dan stabil.

3. Teori Pertumbuhan Keynes

Keynes berpendapat bahwa aktivitas ekonomi bergantung dengan segi permintaan, yaitu pengeluaran agregat yang terjadi dalam perekonomian pada waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Terdapat empat komponen utama pengeluaran agregat yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen penting dalam pengeluaran agregat adalah pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dari perspektif permintaan, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pengeluaran agregat.

4. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori makro Keynes. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukan syarat yang dibutuhkan agar suatu

perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*). Menurut teori Harrod Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yakni: perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*); Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional dan kecenderungan menabung (*marginal propensity to save = MPS*), besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal output (*incremental capital output ratio = ICOR*).

Harrod-Domar memberikan peran penting pembentukan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Investasi dianggap faktor penting karena memiliki dua karakter atau dua peran sekaligus dalam mempengaruhi perekonomian yaitu: pertama, investasi berperan sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan, artinya investasi mempengaruhi sisi permintaan. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran. Oleh sebab itu, pengeluaran pemerintah memiliki peran menjadi salah satu pemberian pemerintah dalam penginvestasian untuk menghasilkan pendapatan nasional.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, (2015) terdapat empat faktor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. yaitu sebagai berikut:

1. Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut, dan jumlah kekayaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa

permulaan. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang baru bermula terdapat banyak tambahan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama (pertanian dan pertambangan). Peranan penanaman barang pertanian untuk ekspor dan pertambangan minyak menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Asia sebagai bukti nyata besarnya peranan kekayaan alam pada tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi.

2. Jumlah Mutu dari Penduduk dan Tenaga kerja

Jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan tenaga kerja. Disamping itu, sebagai akibat dari latihan dan pengalaman kerja serta pendidikan keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal tersebut menyebabkan produktivitas meningkat lebih cepat dibandingkan tenaga kerja. Sehingga luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bergantung pada banyaknya pengusaha dalam ekonomi. Oleh karena hal tersebut, dapat disimpulkan semakin tingginya jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Barang-barang Modal dan Tingkat Teknologi

Teknologi dan barang modal berperan penting dalam meningkatkan koefisien pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dikarenakan kemajuan teknologi membawa berbagai dampak positif di dalamnya. Dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempertinggi koefisien kegiatan produksi yang menimbulkan barang-barang baru dan dapat meningkatkan kualitas barang yang di produksi tanpa meningkatkan biayanya.

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakatnya

Struktur sosial dan sikap masyarakat menciptakan hambatan terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Adat istiadat menjadi penghalang masyarakat untuk mengadopsi teknik memproduksi yang modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat akan menentukan akan sampai mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan sikap masyarakat juga memberikan dorongan terhadap pertumbuhan yakni sikap berhemat untuk melakukan investasi,

sikap dalam menghargai kerja keras dan kegiatan lain untuk mengembangkan usaha.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ridwan Fadhil Muhammad, 2021).

Belanja daerah merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada kepala daerah masing masing (Putri & Selamat, 2021). Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah yang dimaksud untuk digunakan dalam rangka pendanaan dalam melaksanakan urusan pemerintah yang merupakan wewenang provinsi maupun kabupaten atau kota meliputi urusan wajib, urusan pilihan, serta urusan yang ditangani oleh bidang atau bagian tertentu dan pelaksanaannya dilakukan bersamaan oleh pemerintah daerah yang diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diterima menjadi sebuah hal yang mengurangi nilai kekayaan bersih pada periode tahun penganggaran bersangkutan.

Menurut Sukirno Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin pada dokumen

anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja serta memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Bawinti et al., 2018).

Salah satu unsur permintaan agregat adalah pengeluaran pemerintah. Untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran memiliki konsep yaitu $Y=C+I+G+(X-M)$ rumus inilah yang disebut identitas dari pendapatan nasional. Dimana pada variabel Y lambang dari pendapatan nasional serta mencerminkan penawaran agregat. Lalu variabel-variabel lain didalam formula tersebut adalah permintaan agregat. Pada variabel G dilambangkan sebagai pengeluaran pemerintah, lalu melakukan perbandingan serta pengamatan pengaruh G terhadap Y untuk mengetahui berapa besaran kontribusi pengeluaran pemerintah untuk membentuk pendapatan nasional (Rauf Dedy Abdur, 2017).

a. Teori Pengeluaran Secara Makro

Menurut sisi makroekonomi, pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut (Mangkoesoebroto, 2018) teori makro mengenai perkembangan pemerintah dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap awal perkembangan ekonomi yaitu persentase investasi pemerintah terhadap total investasi menjadi besar. Hal ini karena, pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya guna mendukung perkembangan ekonomi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi yaitu investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas,

namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tahap lanjut yaitu perkembangan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wegner

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner Law of Increased Government Activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap *gross nasional product (GNP)*, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri ataupun hubungan industri dengan masyarakat yang menjadi rumit dan kompleks.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini menyatakan bahwa pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain, masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak dinaikkan secara terus menerus. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GDP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*Displacement Effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

b. Teori Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Menurut Mangkoesoebroto, (2018) secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara penawaran dan permintaan untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik.
- b. Perubahan dari kegiatan pemerintah dalam produksi barang publik, dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik.
- d. Perubahan harga faktor produksi.

2.1.5 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keuangan Negara klasifikasi fungsi yaitu terdiri dari 9 fungsi diantaranya pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, serta perlindungan sosial.

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

Belanja bidang ekonomi adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana umum serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini bertujuan untuk memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta memiliki *multiplier effect* (Fransisco et al., 2019). Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ini digunakan dalam rangka memperlancar roda

kegiatan perekonomian suatu daerah. Klasifikasi subfungsi dalam belanja bidang ekonomi ini berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018, yaitu:

a. Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pada subfungsi ini, program dan kegiatan yang meliputi didalamnya yakni diantaranya, pertama kegiatan untuk administrasi hubungan dan pelayanan, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, penyusunan serta penerapan kebijakan, lalu yang kedua peraturan terkait perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM, pasar komoditas dan modal, yang ketiga yakni kegiatan untuk operasional serta dukungan untuk lembaga yang terhubung pada hak cipta, paten dan lainnya. Kemudian yang terakhir yakni pemberian hibah atau insentif dalam pengembangan kebijakan serta program perdangan, pengembangan usaha, koperasi, dan UKM.

b. Tenaga Kerja

Terdapat tiga program kegiatan yang dilakukan pada subfungsi tenaga kerja ini diantaranya yaitu, kegiatan administrasi dan operasional berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan, kegiatan operasional dan dukungan atas lembaga berhubungan dengan mediasi ketenagakerjaan, dan pemberian hibah atau intensif pengembangan kebijakan dan program ketenagakerjaan.

c. Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan ini yang meliputi program dan kegiatan didalamnya yaitu administrasi dan operasional berhubungan terkait pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, kegiatan operasional dan dukungan untuk program dan kegiatan berhubungan dengan kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistic berhubungan dan program terakhir yakni pemberian hibah atau intensif pengembangan kebijakan dan program pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan. Pada subfungsi ini termasuk pada kegiatan penanaman bibit kehutanan, dan yang tidak termasuk program dan kegiatan pada subfungsi ini

yaitu proyek pembangunan multi guna, pengairan, dan kegiatan operasional atau dukungan untuk konservasi sumber daya alam.

d. Pengairan

Dalam subfungsi pengairan ini ada kegiatan dan program yang terdiri didalamnya antara lain, kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pengairan, kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistic berhubungan dengan pengairan, dan pemberian hibah atau intensif pengembangan kebijakan dan program pengairan. Pada subfungsi pengairan ini juga termasuk didalamnya program pelaksanaan proyek pembangunan jaringan pengairan.

e. Bahan Bakar dan Energi

Subfungsi bahan bakar dan energi ini terdiri dari berbagai kegiatan dan program didalamnya, yaitu kegiatan administrasi berhubungan terkait kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi dan nonlistrik, program pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari bahan bakar padat, minyak bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik, kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi dokumentasi, dan statistic berhubungan terkait bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik, serta program pemberian hibah atau intensif pengembangan kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik. Pada subfungsi bahan bakar dan energi ini tidak termasuk kegiatan transportasi oleh bahan bakar padat, bahan bakar minyak dan gas, dan bahan bakar nuklir.

f. Pertambangan

Melalui subfungsi pertambangan ini terdapat beberapa kegiatan dan program yang dilaksanakan, yaitu diantaranya kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pertambangan, program untuk pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari pertambangan, kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan pertambangan, kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi,

dokumentasi, dan statistic yang berhubungan dengan pertambangan, dan program pemberian hibah atau intensif untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan. Dalam subfungsi pertambangan ini juga termasuk pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, dan pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan pertambangan. Dan yang tidak termasuk didalam kegiatan dan program pada subfungsi pertambangan ini yakni kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak dan nuklir, dan program pemberian hibah atau intensif untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan.

g. Industri dan Konstruksi

Didalam subfungsi industri dan konstruksi ini yang termasuk kegiatan dan program yakni, kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan industri dan konstruksi, program pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari industri dan konstruksi, kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi, kegiatan penyiapan dan peyebaran informasi, dokumentasi dan statistic berhubungan oleh industri dan konstruksi, dan program pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program industri dan konstruksi. Pada subfungsi ini juga termasuk didalamnya pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. Ada kegiatan dan program yang tidak termasuk didalam subfungsi industri dan konstruksi ini yaitu kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir, program pemberian hibah atau insentif pada konstruksi perumahan dan bangunan industri, dan kegiatan terhubungkan dengan peraturan standar perumahan.

h. Transportasi

Pada subfungsi transportasi yang menjadi kegiatan dan program yang dilaksanakan didalamnya antara lain, kegiatan administrasi atas operasional, penggunaan, konstruksi, pemeliharaan dari transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya,

program untuk pelaksanaan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya, kegiatan pelaksanaan konstruksi atau operasional dari fasilitas lainnya pendukung transportasi jalan raya, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya, kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistic yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya, dan program pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. Pada subfungsi transportasi ini yang bukan termasuk dalam kegiatan dan programnya yaitu kegiatan pengaturan lalu lintas dan penerangan jalan, dan program pemberian hibah atau insentif untuk perusahaan konstruksi penerbangan, konstruksi kapal, dan kereta api.

i. Telekomunikasi dan Informatika

Dalam subfungsi telekomunikasi dan informatika terdapat kegiatan dan program yang dilaksanakan yakni kegiatan administrasi dan konstruksi, perbaikan pengembangan, operasional dan pemeliharaan sistem telekomunikasi dan informatika, program terkait peraturan yang berhubungan dengan sistem telekomunikasi, kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistic tentang telekomunikasi, dan program untuk pemberian hibah, pinjaman atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan program telekomunikasi. Dan pada subfungsi telekomunikasi dan informatika ini juga termasuk kegiatan untuk pengembangan teknologi telematika. Akan tetapi tidak termasuk kegiatan yang berhubungan dengan radio dan satelit navigasi untuk transportasi air dan penyiaran radio dan televisi.

j. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

Pada subfungsi penelitian dan pengembangan ekonomi terdapat kegiatan dan program yang dilaksanakan didalamnya yaitu kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintahan dalam penelitian terapan dan

pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar pertanian dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, komunikasi dan industri lainnya, dan program pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Akan tetapi pada subfungsi penelitian dan pengembangan ekonomi ini tidak termasuk didalamnya kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK.

k. Ekonomi lainnya

Pada subfungsi ekonomi lainnya ini terdapat kegiatan yang dilaksanakan didalamnya yaitu kegiatan administrasi, operasional, atau dukungan yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak terklasifikasi dalam 10 subfungsi sebelumnya, dan termasuk kegiatan yang berhubungan dengan meteorology dan geofisika, multi proyek, penyimpanan, dan distribusi.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

Belanja bidang pelayanan umum merupakan pengeluaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan atau perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari. (Fransisco et al., 2019).

a. Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

Pada subfungsi ini, program dan kegiatan didalamnya meliputi, pertama kegiatan untuk administrasi, operasional, atau pemberian dukungan untuk lembaga eksekutif, legislatif, instansi yang menangani urusan keuangan dan

fiskal, manajemen kas negara, utang pemerintah, dan operasional pajak. Lalu yang kedua kegiatan yang terkait Kementerian Keuangan selaku BUN (pengelola fiskal), yang ketiga yaitu kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, kegiatan diplomat, misi-misi internasional dan lain-lain. Dan yang keempat kegiatan untuk penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai keuangan dan fiskal.

b. Bantuan Luar Negeri

Terdapat empat program pada subfungsi bantuan luar negeri ini antarlain yaitu, kegiatan yang ditujukan untuk administasi sebagai kerjasama ekonomi dengan negara-negara transisi, administrasi bantuan luar negeri yang disalurkan melalui internasional. Kedua yaitu untuk kegiatan operasional misi-misi bantuan ekonomi terhadap negara-negara tertentu, yang ketiga pemberian kontribusi untuk dana pembangunan ekonomi yang diadministrasikan oleh lembaga internasional/regional dan pemberian bantuan ekonomi dalam bentuk hibah dan pinjaman.

c. Pelayanan Umum

Dalam subfungsi ini pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang tidak dilakukan oleh fungsi tertentu, anantara lain administrasi kepegawaian nasional, statistik, dan administrasi kependudukan secara nasional.

d. Penelitian Dasar dan Pengembangan IPTEK

Subfungsi ini penelitian dasar dan Pengembangan IPTEK ada kegiatan dan program diantaranya yaitu, kegiatan administrasi, operasional, dan koordinasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK dan pemberian hibah atau intensif dalam rangka mendukung penelitian dasar dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.

e. Utang Pemerintah

Dalam subfungsi utang pemerintah yang termasuk kegiatan dan program didalamnya yaitu, pembayaran bunga utang dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan utang pemerintah.

f. Pembangunan Daerah

Pada subfungsi pembangunan daerah terdapat kegiatan dan program yang dilaksanakan didalamnya yaitu pelaksanaan transfer umum antarlevel pemerintah yang tidak ditentukan penggunaannya dan kegiatan untuk administrasi dan operasional dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat.

g. Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah

Terdapat dua program kegiatan yang ada pada subfungsi penelitian dan pengembangan pelayanan umum pemerintah diantaranya yaitu, kegiatan administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pelayanan umum pemerintah dan yang kedua yaitu, kegiatan hibah intensif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah umum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta.

h. Pelayanan Umum Pemerintah Lainnya

Dalam subfungsi pelayanan umum pemerintah lainnya ini ada kegiatan dan program didalamnya antarlain, kegiatan administrasi dan operasional terhadap pelayanan umum pemerintah yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam subfungsi pelayanan umum seperti tugas-tugas pemilihan umum.

2.2 Hubungan Antar Variabel Penelitian

**2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dengan
Pertumbuhan Ekonomi**

Belanja pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan kepada dua golongan yang utama yaitu penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan

investasi pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan golongan investasi pemerintah karena pengeluaran pemerintah bidang ekonomi meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai belanja pemerintah atas produk nasional karena belanja tersebut bukan untuk membeli barang dan jasa (Sukirno, 2019). Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk investasi ini tentunya diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan barang atau jasa publik akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat maupun swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi akan mendorong peningkatan sektor produksi pada akhirnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Mengenai hubungan antara pengeluaran publik atau pelayanan umum, teori keynes berasumsi bahwa belanja publik yang tinggi akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat dan pada gilirannya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Muhammed, 2014). Pengeluaran pemerintah pada berbagai sektor publik atau pelayanan umum merupakan bidang pengeluaran yang sangat penting bagi proses pembangunan yang meliputi pengadaan dan perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lain, ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah tentunya akan meningkatkan perekonomian daerah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat mempermudah dalam pengambilan data, pengumpulan data dan pengolahan data serta dalam penggunaan metode analisis yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Model	Hasil
1	(Putri & Selamet, 2021)	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi	Menggunakan alat analisis data panel	Variabel belanja daerah memiliki pengaruh yang negative dan tidak signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi jambi.
2	(Yuliana et al., 2023)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh	Menggunakan alat analisis data panel	Variabel Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 dan variabel Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pelayanan Umum berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019.
3	(Bawinti et al., 2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan	Menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan variabel Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud

		Talaud		Tahun 2008-2017.
4	(Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Menggunakan alat analisis <i>Error Correction Model (ECM)</i> .	Tidak ada variabel signifikan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, Namun, dalam jangka panjang, belanja pemerintah di sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah di sektor infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5	(Agustina, 2019)	Pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan kontribusi industri pengolahan terhadap	Menggunakan alat analisis regresi liner berganda dengan <i>fixed effect</i> .	variabel pengeluaran pemerintah dan variabel kontribusi industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

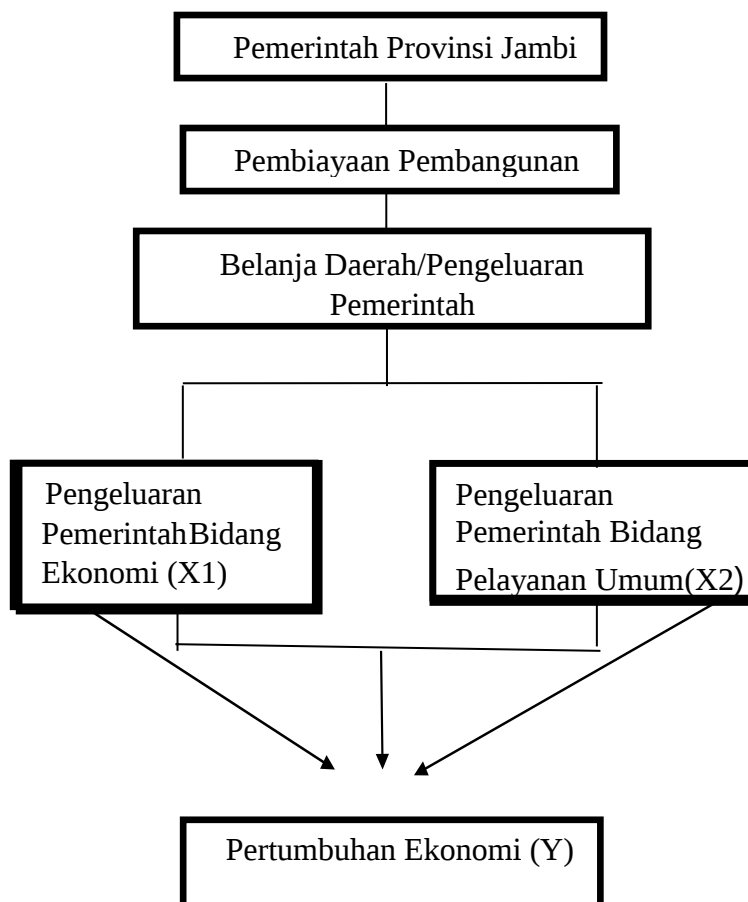
		pertumbuhan ekonomi Jawa Barat		ekonomi Jawa Barat tahun 2011-2016.
6	(Ginting, 2018)	Pengaruh Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Menggunakan alat analisis data panel	Variabel belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I.Y. Tetapi variabel belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota D.I.Y.
9	(Tasmilah, 2021)	Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia	Menggunakan analisis persamaan simultan 2SLS	Variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah (menurut fungsi ekonomi, infrastruktur/perumahan dan fasilitas umum, dan perlindungan sosial), PMA, dan jumlah tenaga kerja formal. variabel yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah fungsi pariwisata dan PMDN.

8	(Dudzeviciute, 2023)	<i>Dependence Of Economic Growth On Government Expenditure By Function In The Baltic States</i>	Menggunakan alat analisis data panel.	Variabel pertumbuhan perekonomian Latvia dan Estonia bergantung pada belanja pemerintah secara umum. Ketergantungan ini serupa di kedua negara, yaitu 62,8% di Latvia dan 66,5% di Estonia. Di Lituania, 57,7% fluktuasi pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pengeluaran untuk perlindungan sosial. Di Latvia, pengaruh pengeluaran untuk perlindungan sosial dan perekonomian mencapai 63,4% terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Estonia, pengeluaran untuk perlindungan sosial dan kesehatan menyebabkan 78,1% fluktuasi pertumbuhan ekonomi.
9	(Popescu & Maxim, 2021)	Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kointegrasi di Rumania	Menggunakan model <i>kointegrasi johansen</i>	Dalam jangka Panjang menunjukkan variabel pengeluaran pemerintah tidak ada vektor kointegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di Rumania namun variabel pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi

				mendukung hubungan kausalitas ganda dalam jangka pendek di Rumania.
10	(Babatunde, 2018)	<i>Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria</i>	Uji akar dan uji kointegrasi menggunakan model <i>augmented dickey-fuller</i> dan <i>Philip-perron</i> .	Variabel pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur transportasi dan pendidikan, dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria.
11	(Nartea & Hernandez, 2020)	<i>Government Size, the Composition of Public Spending and Economic Growth in Netherland</i>	Menggunakan model estimasi regresi nonlinier <i>lessquares</i> .	Variabel pengeluaran pemerintah hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari ukuran pemerintah dan pola belanjanya.
12	(Marta Pascual, Santiago Alvarez-Garcia, 2017)	<i>Government expenditure and economic growth in the European Union countries: New evidence</i>	Menggunakan Teknik data panel.	Variabel pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Uni Eropa periode 1994-2012.
13	(Al-tamimi, 2020)	<i>Government Spending as a Tool for Economic Growth in the Economy of Jordan</i>	Menggunakan metode <i>autoregressive Distributed Lag (ARDL)</i>	Variabel pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak berpengaruh tidak signifikan persentase PDB terhadap perekonomian Yordania tahun 2010-2019.

2.4 Kerangka Pemikiran

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto pada dasar harga konstan. Dalam perekonomian, khususnya untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan suatu daerah. Berdasarkan pada teori Keynes dan Harrod Domar mengemukakan peran pemerintah adalah salah satu komponen yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah yang dimaksud adalah kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah yang merupakan bagian dari kebijakan anggaran dalam rangka pengalokasian realisasi pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Belanja atau pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini ditinjau pada bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap fenomena dan gejala masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, kajian empiris dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum memiliki pengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, artikel yang memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum, dan pertumbuhan ekonomi.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah dikumpulkan dan data tersebut telah tersedia pada publikasi dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.2 Metode dan Alat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif yaitu berbentuk numerik, dan metode perhitungan penelitian ini menggunakan metode statistik dengan menggunakan *software eviws*. Metode yang digunakan dalam penelitian antara lain:

3.2.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023. Analisis deskriptif adalah pendekatan penelitian yang

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data secara objektif tanpa melakukan intervensi atau membuat kesimpulan tentang populasi luas.

Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Metode ini melibatkan pengumpulan, penyajian, pengorganisasian, dan intervensi data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

3.2.2 Analisis Regresi Data Panel

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua digunakan model regresi data panel. Menurut Ghazali & Ratmono, (2017) model regresi data panel merupakan model analisis yang menggunakan data panel yaitu gabungan antara dua deret waktu (*time-series*) dan data deret lintang (*cross-section*). Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear berganda dengan data panel. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross-section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time-series*). Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum, sehingga persamaan model regresi data panel yang terbentuk antaralain:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana:

- Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi
- X_1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi
- β_2 = Koefisien Regresi
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

ε	= <i>Error of term</i>
i	= Wilayah ke-i
t	= Tahun ke-t

3.2.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect, sedangkan untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini maka digunakan uji chow , uji hausman, dan uji langrange (Ghozali & Ratmono, 2017):

1. *Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square (PLS)*

Model *Pooled* atau *common effect* adalah model yang paling sederhana karena metode yang digunakan dalam metode common effect hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam berbagai rentang waktu.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel menggunakan metode *common effect*, penggunaan data panel *common effect* tidak realistis karena akan menghasilkan intersept atau slope pada data panel yang tidak berubah baik antar individu (*cross-section*) maupun antar waktu (*time-series*).

3. *Random Effect Model (REM)*

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error (yaitu individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error untuk komponen individu, error untuk komponen waktu, dan error gabungan.

3.2.4 Pengujian Model Regresi Data Panel

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel maka *digunakan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier* (Ghozali & Ratmono, 2017):

1. Uji Chow

Uji Chow yang dilakukan untuk menentukan uji mana diantara kedua metode yakni metode *common effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam *uji Chow* ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Metode *Common Effect*

H_1 : Metode *Fixed Effect*

Statistik chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas bebas (N-1, NT – N – K). Jika nilai statistik chow (F-statistik) > Ftabel atau nilai probabilitas < 0,05, maka H_1 diterima dan yang terpilih adalah model *fixed effect*, begitu pula sebaliknya.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan uji mana diantara kedua metode, yakni metode *random effect* dan *metode fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel dalam penelitian ini. Hipotesis dalam *uji hausman* ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Metode Random Effect

H_1 : Metode Fixed Effect

Apabila hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas < 0,05, maka model *fixed effect* yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini dan H_1 diterima, begitu pula sebaliknya.

3. Uji Langrange Multiplier atau Bruesch-Pagan

Uji Lagrange Multiplier adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi *Random Effect* didasarkan pada nilai

residual dari metode *Common Effect*. Hipotesis dalam uji hausman ini adalah sebagai berikut:

H0: Metode *Random Effect*

H1: Metode *Common Effect*

Apabila nilai LM statistik lebih besar dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka model *Common Effect* yang lebih baik digunakan dalam penelitian ini dan H1 diterima, begitu pula sebaliknya. Uji LM tidak digunakan apabila pada uji *chow* dan uji *hausman* menunjukkan model yang paling tepat adalah model *Fixed Effect*. Uji LM dipakai manakala pada uji *chow* menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect*, sedangkan pada uji hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah Random Effect, maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir.

3.2.5 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali & Ratmono (2017), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Selain itu, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual yaitu jika probabilitas lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali & Ratmono (2017), multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah multikolinearitas.

Alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), korelasi person antara variabel- variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition index (CI) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.
- b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,80) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali & Ratmono (2017), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas, diantaranya adalah dengan menggunakan grafik Scatterplot dan juga Uji Glejser. Pada grafik Scatterplot, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik- titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan Uji Glejser dapat dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai absolut residual ($AbsU_i$) terhadap variabel independen lainnya. Jika nilai

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali & Ratmono, (2017), pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai Durbin-Watson hitung (d) dengan nilai Durbin-Watson tabel, yaitu batas atas (d_U) dan batas bawah (d_L). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $d_w < d_L$ maka terdapat autokorelasi
2. Jika $d_w > d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi
3. Jika $(4-d_w) < d_L$ maka terdapat autokorelasi
4. Jika $(4-d_w) > d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi
5. Jika $d_L < (4-d_w) < d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

3.2.6 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali dan Ratmono (2017), uji F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika memiliki nilai signifikansinya $< 0,05$.

2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut Ghazali & Ratmono (2017), uji t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Hipotesis diterima mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali & Ratmono (2017), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya nilai R^2 berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu $0 < R^2 < 1$. Nilai yang mendekati 0 (nol) berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan *Adjusted R²* karena lebih akurat untuk mengevaluasi model regresi.

3.3 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen (terikat) dan variabel independent (bebas). Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent dan sebaliknya variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dan independent dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi adalah realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada bidang ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah pada setiap tahun selama 2017-2023.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

Pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum adalah realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jambi pada bidang pelayanan umum yang dinyatakan dalam satuan rupiah pada setiap tahun selama 2017-2023.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun tertentu, dilakukan dengan perbandingan pada tahun sebelumnya. Pada penelitian ini data pertumbuhan ekonomi di peroleh dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 kabupaten/kota Provinsi Jambi yang dinyatakan dalam satuan persen, pada setiap tahun selama 2017-2023.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Penduduk

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera yang berbatas pada, disebelah utara dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, berbatasan Laut Cina Selatan pada bagian timur, pada bagian selatan berbatas Provinsi Sumatra Utara, serta berbatas langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu pada bagian barat. Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup strategis dikarenakan langsung dihadapkan oleh kawasan pertumbuhan perekonomian IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1957 terkait Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang setelah itu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaga Negara Tahun 1958 No. 112) luas wilayah yang dimiliki Provinsi Jambi yaitu 53.435,72 km² di dalamnya terdapat 50.160,05km² luas daratan, dan 3.274,95km² luas perairan.

Penduduk merupakan jumlah dari seluruh orang yang berdomisilikan pada wilayah geografis Republik Indonesia dalam kurun waktu enam bulan atau lebih, serta berdomisilikan kurang enam bulan akan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Jumlah penduduk mempunyai peran besar dalam kehidupan suatu negara. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya harus diimbangi dengan pertumbuhan sumber daya alam yang memadai. Pertumbuhan penduduk juga harus diiringi dengan persebaran penduduk yang merata. tanpa persebaran penduduk yang merata dan laju pertumbuhan yang tidak terkendali maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Setiap Provinsi di Indonesia pada hakikatnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan penduduk. Terwujudnya penduduk yang sejahtera tercermin pada kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih berkualitas. Pembangunan ekonomi memiliki peran yang besar dalam upaya peningkatan

kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan oleh kaitannya yang luas terhadap aspek-aspek kehidupan penduduk. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mengindikasikan berhasilnya pembangunan ekonomi. Guna untuk mengetahui pertumbuhan penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022

Wilayah	Penduduk Provinsi Jambi (Jiwa) Tahun 2017-2022						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Batanghari	266.971	269.966	272.879	275.504	304.875	308.838	3,51
Pertumbuhan (%)	-	1,12	1,08	0,98	10,66	1,30	
Bungo	359.590	367.182	374.770	382.311	366.367	371.419	0,68
Pertumbuhan (%)	-	2,11	2,07	2,01	-4,17	1,38	
Kerinci	236.782	237.791	238.682	239.606	251.747	253.469	1,39
Pertumbuhan (%)	-	0,43	0,37	0,39	5,07	0,68	
Merangin	377.905	383.480	388.928	394.174	358.110	362.290	-0,75
Pertumbuhan (%)	-	1,48	1,42	1,35	-9,15	1,17	
Muaro Jambi	421.179	432.305	443.364	454.524	406.910	412.912	1,63
Pertumbuhan (%)	-	2,64	2,56	2,52	-1,04	1,48	
Sarolangun	290.231	295.985	301.908	307.585	293.430	297.882	0,58
Pertumbuhan (%)	-	1,98	2,00	1,88	-4,46	1,51	
Tanjab Barat	322.527	328.343	333.932	339.286	321.210	325.849	0,24
Pertumbuhan (%)	-	1,80	1,70	1,60	-5,33	1,44	
Tanjab Timur	216.777	218.413	219.985	221.619	232.023	234.408	1,59
Pertumbuhan (%)	-	0,75	0,72	0,74	4,69	1,03	
Tebo	343.003	348.760	354.485	360.193	341.451	346.161	0,22
Pertumbuhan (%)	-	1,68	1,64	1,61	-5,20	1,37	
Kota Jambi	591.134	598.103	604.736	611.353	612.717	620.308	0,97
Pertumbuhan (%)	-	1,18	1,11	1,09	0,22	1,23	
Sungai Penuh	88.918	89.944	90.910	91.739	97.554	98.654	2,12
Pertumbuhan (%)	-	1,15	1,07	0,91	6,33	1,12	
Provinsi Jambi	3.515.017	3.570.272	3.624.579	3.677.894	3.586.395	3.633.190	0,68
Pertumbuhan (%)	-	1,57	1,52	1,47	-2,48	1,30	

Sumber: BPS Provinsi Jambi (diolah), 2024

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dapat dilihat tabel 4.1 terjadi fluktuasi. Dimana rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi dari tahun 2017-2022 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 0,68 persen. Untuk Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi Kabupaten Batanghari dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 persen, hal tersebut tinggi dibanding oleh rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Batanghari dimana pada tahun 2017 berjumlah 266.971 jiwa menjadi 308.838 jiwa pada tahun 2022.

Faktor pertumbuhan alami yaitu berupa selisih diantara tingkat kelahiran serta tingkat kematian dan juga faktor imigrasi masuk pada suatu daerah. Hal tersebut yang menyebabkan Kabupaten Batanghari mengalami pertumbuhan penduduk. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata pertumbuhan penduduk terendah Kabupaten Merangin dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar -0,75 persen dimana pada tahun 2017 berjumlah 377.905 jiwa dan pada tahun 2022 menjadi 362.290 jiwa. Dengan rendahnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merangin dikarenakan tingginya budaya merantau yang dilakukan oleh penduduk asli daerah tersebut, sehingga hal ini menyebabkan relatif tingginya migrasi keluar penduduk. Selain itu disebabkan terjadinya Covid-19 yang mengakibatkan besarnya penurunan jumlah penduduk tahun 2021 di Kabupaten Merangin.

Selanjutnya pada tahun 2022 untuk jumlah penduduk terbanyak tercatat pada Kota Jambi yaitu sebanyak 620.308 jiwa, dimana Kota Jambi merupakan daerah dengan luas wilayah yang paling kecil di Provinsi Jambi dimana hanya 0,41 persen dari luas wilayah Provinsi. Walaupun dengan luas wilayah terkecil dibandingkan dengan daerah lain, Kota Jambi merupakan dengan jumlah penduduk terbanyak, hal ini dikarenakan Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, industri, dan perdagangan. Hal ini yang menjadi pendorong tingginya jumlah penduduk daerah lain untuk melakukan migrasi ke Kota Jambi, terkhusus etnis Jawa sudah sangat padat, karena itulah mereka yang tidak memiliki kemampuan lebih sangat sulit untuk bersaing di daerahnya asalnya, dan itulah yang membuat mereka untuk memutuskan mencari tempat baru dan dijadikanlah Kota Jambi sebagai daerah tujuan para migran tersebut.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terendah pada tahun 2017 yaitu Sungai Penuh dimana jumlah penduduk sebanyak 88,918 jiwa, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yang rendah ini dikarenakan Kota Sungai Penuh merupakan daerah pemekaran Kabupaten Kerinci, dimana kota Sungai Penuh ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 8 Oktober 2009, rendahnya jumlah penduduk ini dikarenakan dilakukan pemekaran, yang

menyebabkan sulitnya untuk melakukan perpindahan pegawai dari wilayah induk menuju wilayah pemekaran, serta terdapat beberapa masalah yang seringkali terjadi pada daerah pemekaran, seperti belum dimilikinya batas wilayah, yang jelas, terdapat permasalahan pembiayaan personil dan peralatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. hal tersebut yang mengakibatkan sulitnya wilayah pemekaran berkembang dan memaksimalkan potensi daerah. Selain itu, yang menyebabkan rendahnya jumlah penduduk Kota Sungai Penuh yaitu karena daerah ini merupakan daerah dengan luas wilayah terendah kedua, dimana hanya 0,78 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Kabupaten Merangin merupakan daerah yang yang terluas di Provinsi Jambi, dimana 15,31 persen luas wilayah Provinsi Jambi merupakan daerah Kabupaten Merangin. Walaupun daerah terluas di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin itu sendiri bukan daerah dengan penduduk terbanyak, dimana tingkat pertumbuhan penduduknya Kabupaten Merangin termasuk pada daerah pertumbuhan penduduk rendah, dimana dengan rata-rata pertumbuhan -0,75 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk merangin memilih merantau ke kota-kota besar untuk menempuh pendidikan tinggi ataupun untuk mencari pekerjaan.

4.2 PDRB Kabupaten/Kota

Pengukuran nilai tambah yang disebabkan oleh berbagai macam aktivitas ekonomi pada suatu wilayah disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang ada pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menjadi gambaran pada kemampuan yang miliki suatu daerah pada pengelolaan sumber daya alam yang mereka punya dengan melalui proses produksi. Oleh sebab itu, sumber daya alam dan faktor produksi menjadi hal dapat menunjukkan besaran dan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu daerah. Struktur PDRB kabupaten/kota bervariasi diantara daerah satu dengan daerah lain, hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan untuk penyediaan dan kemampuan sumber daya alam dan faktor produksi suatu daerah.

Tabel 4.2 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas terhadap Total PDRB Tahun 2015-2022 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batanghari	7,72	7,48	7,51	7,92	8,08	8,82
Bungo	8,42	8,26	8,16	8,36	8,63	9,04
Kerinci	4,67	4,49	4,52	5,05	4,83	4,43
Merangin	7,11	6,90	6,97	7,57	7,66	7,36
Muaro Jambi	11,21	10,96	11,08	11,77	11,85	11,96
Sarolangun	7,07	6,92	6,9	6,97	7,11	7,53
Tanjab Barat	18,75	19,79	19,58	17,93	18,07	18,17
Tanjab Timur	11,06	11,51	11,25	9,45	9,36	9,29
Tebo	6,82	6,61	6,65	7,12	7,28	7,15
Kota Jambi	13,82	13,75	13,97	14,23	13,70	13,11
Kota Sungai Penuh	3,35	3,32	3,41	3,65	3,43	3,15
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Tabel 4.2 diatas menjelaskan peningkatan teratas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023 tidak mengalami perubahan, dimana peningkatan pertama di pegang oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi pada posisi kedua, dan peringkat tersebut diikuti oleh kabupaten muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan kontribusi sebesar 19,79 persen dan Kota Jambi memberikan kontribusi sebesar 14,23 persen selanjutnya Kabupaten Muaro Jambi memberikan kontribusi sebesar 14,23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi . Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 Tanjung Jabung Timur naik peringkat ketiga, kemudian diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kembali produksi minyak dan gas sebagai produksi utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2018 di susun dengan urutan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Bungo, Batanghari, Merangin, Sarolangun,

Tebo, Kerinci, dan yang terakhir Kota Sungai Penuh dengan kontribusi sebesar 3,65 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Keadaan pada tahun 2021 mengalami kemiripan dengan tahun 2022, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menjadi peringkat pertama dan pada peringkat terakhir yaitu Kota Sungai Penuh. Akan tetapi pada beberapa Kabupaten/Kota terjadi perubahan besaran Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Daerah dengan peningkatan Kontribusi yaitu Kabupaten Batanghari, Bungo, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat sedangkan daerah yang mengalami penurunan pada kontribusinya yaitu Kabupaten Kerinci, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh, penurunan tersebut disebabkan oleh dampak Covid-19 pada tahun 2020.

Tabel 4.3 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Terhadap Total PDRB Tahun 2017-2022 (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batanghari	9,05	8,93	8,88	8,89	9,12	10,08
Bungo	10,15	10,21	9,95	9,56	9,93	10,54
Kerinci	5,62	5,55	5,51	5,78	5,55	5,17
Merangin	8,56	8,53	8,50	8,65	8,82	8,58
Muaro Jambi	12,52	12,39	12,45	12,72	12,86	13,04
Sarolangun	7,50	7,57	7,50	7,43	7,54	8,01
Tanjab Barat	12,33	12,30	12,44	12,59	12,62	12,32
Tanjab Timur	5,94	6,00	6,10	6,20	5,93	5,53
Tebo	7,87	7,77	7,76	7,93	8,15	8,05
Kota Jambi	16,41	16,66	16,74	16,08	15,53	15,01
Kota Sungai Penuh	4,04	4,10	4,16	4,18	3,94	3,67
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Tabel 4.3 diatas menjelaskan peningkatan teratas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023 tidak mengalami perubahan, dimana peningkatan pertama di pegang oleh Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi pada posisi kedua, dan peringkat

tersebut diikuti oleh kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Bungo. Dimana Kota Jambi memberikan kontribusi sebesar 16,74 persen dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan kontribusi sebesar 12,62 persen selanjutnya Kabupaten Bungo memberikan kontribusi sebesar 10,54 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017-2023 di susun dengan urutan Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Kerinci, dan yang terakhir Kota Sungai Penuh dengan kontribusi sebesar 4,18 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ekonomi, Bidang Pelayanan Umum dan Pertumbuhan Ekonomi

5.1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Pada penelitian ini menggunakan data 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tujuh tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai 2023. Guna menjawab rumusan masalah pertama, berikut dijelaskan bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Seluruh pengeluaran pemerintah di suatu periode penganggaran disebut dengan belanja daerah. Pada perekonomian suatu daerah, belanja ini sangat memiliki peran penting terutama dalam peran pemerintah untuk pengalokasian anggaran belanja. Hendaknya dalam pengalokasian pengeluaran yang tepat oleh pemerintah daerah pada tiap tahun terus meningkat, dengan peningkatan ini maka akan terdapat peningkatan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dapat dinilai memiliki kualitas atau tidak suatu belanja daerah tersebut ditinjau dari besaran pengalokasian belanja yang dipakai dalam pembiayaan kegiatan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dengan langsung. Pengeluaran atau belanja bidang ekonomi ini merupakan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk bidang perdagangan, pengembangan usaha, koperasi dan UMKM, tenaga kerja, pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, pengairan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, telekomunikasi, dan informatika, penelitian dan pengembangan ekonomi serta ekonomi lainnya.

Dalam memperjelas gambaran perkembangan pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023

Wilayah	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (Persen) Tahun 2017-2023							Rata-rata Perkembangan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	-	3,46	9,77	10,56	-34,39	273,30	43,83	51,09
Bungo	-	6,99	10,76	9,23	51,72	10,01	-2,29	14,40
Kerinci	-	-13,66	33,48	-9,91	-22,41	162,06	7,29	26,14
Merangin	-	-0,30	23,16	-9,36	330,60	-68,72	73,03	58,07
Muaro Jambi	-	-5,07	30,72	1,71	-22,62	308,55	-11,36	50,32
Sarolangun	-	3,13	25,17	-5,32	-10,18	17,18	12,90	7,15
Tanjab Barat	-	0,45	16,62	-3,23	-26,07	423,58	-26,83	64,09
Tanjab Timur	-	3,99	-4,26	-8,30	-49,39	463,71	-16,60	64,86
Tebo	-	-0,51	22,42	-9,27	304,82	105,63	-51,63	61,91
Kota Jambi	-	-2,76	10,80	-0,80	-20,93	306,25	8,62	50,20
Sungai Penuh	-	8,75	17,40	-11,67	134,43	-25,46	11,67	22,52

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah), 2024

Dapat dilihat pada tabel 5.1 bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi mengalami fluktuasi. Dimana jika berdasarkan rata-rata perkembangan tertinggi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 64,86 persen. Tingginya pengeluaran pengeluaran atau belanja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan untuk untuk pengembangan ekonomi dalam mendukung program-program untuk meningkatkan perekonomian daerah seperti pembangunan pasar, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta ketenagakerjaan. Selain itu, sebagai pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pembangunan wilayah layak huni, dan bantuan sosial. Serta untuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia termasuk biaya pelatihan pegawai, pendidikan, dan pengembangan SDM lainnya.

Selanjutnya daerah dengan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi terendah yaitu Kabupaten Sarolangun dengan rata-rata perkembangan sebesar 7,15 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi

penurunan yang signifikan pada pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar -10,28 persen, hal ini turun di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan perkembangan sebesar 17,18 persen dan 12,90 persen tetapi rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Selain itu rendahnya perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi pada Kabupaten Sarolangun ini disebabkan oleh adanya kebijakan kontraktif atau kebijakan fiskal surplus yang dilakukan pemerintah sebagai pilihan untuk mengendalikan belanja yang lebih kecil dari pada pendapatan. Kebijakan ini memiliki tujuan agar permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa secara umum tidak meningkat.

5.2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di suatu wilayah. Setiap individu membutuhkan barang maupun jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Belanja atau pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan administratif yang disediakan oleh pemerintah, barang yang dimaksud bukanlah barang yang diperdagangkan oleh manusia sehari-hari melainkan barang publik (*public goods*) yaitu barang yang dikonsumsi secara bersama, dimana dapat digunakan setiap anggota masyarakat tanpa mengurangi ketersediaan bagi semua orang yang penyediaanya dilakukan oleh pemerintah.

Hakikatnya pengelaran pemerintah bidang pelayanan umum ialah upaya dalam pemenuhan satu dari beberapa hak dasar masyarakat, yakni hak dasar mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan publik secara adil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemabngunan daerah. Berikut ini merupakan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023:

**Tabel 5.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023**

Wilayah	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum (Persen) Tahun 2017-2023							Rata- rata Perke- mbang- an (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Batanghari	-	3,14	13,95	8,6	-17,07	1,91	5,99	2,75
Bungo	-	10,16	4,43	74,64	-51,03	10,86	11,56	10,10
Kerinci	-	29,33	-4,18	-8,25	-13,15	10,21	4,07	3,01
Merangin	-	-2,30	9,76	-0,39	-4,00	-2,19	4,93	0,97
Muaro Jambi	-	-0,60	24,23	2,14	-22,03	17,25	11,06	5,34
Sarolangun	-	-3,62	21,83	-1,99	18,57	29,33	-10,44	8,95
Tanjab Barat	-	3,99	22,61	5,93	-18,3	5,95	5,25	4,24
Tanjab Timur	-	10,34	11,15	17,95	-23,58	12,98	3,48	5,39
Tebo	-	4,32	10,71	7,36	-13,41	8,6	4,06	3,61
Kota Jambi	-	8,35	18,05	8,22	-19,88	14,35	9,40	6,42
Sungai Penuh	-	10,61	18,37	15,49	-23,99	30,87	-8,76	7,10

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 5.2 perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum mengalami fluktuasi. Dimana jika berdasarkan rata-rata perkembangannya Kabupaten Bungo merupakan daerah yang memiliki rata-rata perkembangan tertinggi yaitu sebesar 10,10 persen ini disebabkan tahun 2020 pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum Kabupaten Bungo mengalami peningkatan sebesar 74,64 persen walaupun mengalami penurunan ditahun selanjutnya. Tingginya pengeluaran atau belanja pemerintah daerah Kabupaten Bungo digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi publik, jembatan, penyediaan tenaga listrik, jaringan telepon, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Dan realisasi belanja pemerintah ini juga digunakan untuk biaya operasional dalam birokrasi pemerintahan, gaji pegawai, dan administrasi pemerintah.

Sedangkan Kabupaten Merangin merupakan daerah yang memiliki rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum terendah yaitu 0,97 persen, hal ini dikarenakan terus terjadi penurunan perkembangan pengeluaran pada tahun 2019 hingga 2021 dengan penurunan yang paling besar yaitu -4,00 persen pada tahun 2021 akibat dari dampak Covid-19, walaupun

terjadi peningkatan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum pada 2023 yaitu sebesar 11,56 persen, tetapi rata-rata perkembangan Kabupaten Merangin tetap yang terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Rendahnya perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum pada Kabupaten Merangin ini disebabkan oleh adanya kebijakan kontraktif atau kebijakan fiskal surplus yang dilakukan pemerintah sebagai pilihan untuk mengendalikan belanja yang lebih kecil dari pada pendapatan. Kebijakan ini memiliki tujuan agar permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa secara umum tidak meningkat. Kabupaten Kerinci merupakan daerah yang memiliki perkembangan tertinggi yaitu sebesar 29,33 persen. Kabupaten Kerinci juga merupakan daerah yang belanja ekonominya tertinggi dibandingkan daerah lain di tahun 2018 yaitu sebesar 570.642,55 milyar rupiah, walaupun mengalami penurunan di tahun berikutnya yaitu sebesar -4,18 persen.

Tabel 5.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2023 (persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi (Persen)							Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Provinsi Jambi	4,60	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	4,66	3,80
Batanghari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,70	5,01
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,66	4,06
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73	4,70
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28	4,51
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	6,28	4,77
Sarolangun	4,68	4,80	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,02	4,41
Tanjab Barat	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,51	3,34
Tanjab Timur	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17	1,38
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,30	6,30	4,50	4,34
Kota Jambi	4,68	5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36	6,61	3,79
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	4,92	4,11

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Tabel 5.3 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dimulai tahun 2017-2023 mengalami perkembangan dari waktu ke waktunya. Pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jambi memiliki rata-rata yaitu 3,80 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ini termasuk rendah, dikarenakan terjadinya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan ekonomi pada wilayah Jambi,

pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang rata-rata pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di urutan kedua paling rendah yaitu sebesar 3,34 persen. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Barat tahun 2023, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 17 sektor ekonomi yang menyumbang kepada Produk Domestik Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan positif. Terdapat 11 sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif 5 persen hingga 10 persen. Sedangkan 6 sektor ekonomi lainnya tercatat mengalami pertumbuhan positif tetapi lebih rendah yaitu kurang dari 5 persen. Salah satu lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan lebih rendah adalah sektor pertambangan dan penggalan. Rata-rata pertumbuhan Tanjung Jabung Barat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah yaitu sebesar 1,38 persen, hal menunjukkan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, yang menjadi penyebab rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu karena potensi yang dimiliki sumber daya alam wilayah ini tidak dapat diandalkan karena wilayah kabupaten ini merupakan wilayah tanah gambut, sehingga produksi sektor pertanian dan perkebunan tidak mendukung, begitupun sektor sekunder dimana tidak banyak perusahaan yang memiliki ketertarikan untuk melakukan investasi pada daerah ini.

Perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian global akibat terjadinya pandemic Covid-19 di dunia berdampak pada capaian kinerja perekonomian pada tahun 2020. Dimana pandemic Covid-19 ini mengubah arah serta laju pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten/kota pada Provinsi Jambi. Pertumbuhan perekonomian pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020 ini berada pada antara minus -3,44 sampai dengan -4,24 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu Kabupaten Batanghari dan yang terendah yaitu Tanjung Jabung Timur. Perekonomian Provinsi Jambi ini mengalami penurunan sebesar -0,51 persen. Dari sisi produksi terjadi penurunan pada sebagian lapangan usaha,

dengan penurunan terdalam berasal dari transportasi dan perdagangan\ sebesar 14,43 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran penerunan terbesar berasal dari ekspor sebesar 10,14 persen.

Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang mempunyai rata-rata pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 5,01 persen, hal ini dikarenakan Batanghari memiliki sektor pertambangan dan penggalian dimana sektor ini adalah dominan dan memiliki peran penting dalam roda perekonomian Kabupaten Batanghari, pada daerah ini pada tahun 2022 tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu 12,27 persen. Sumber perekonomian utama masyarakat di Kabupaten Batanghari adalah dari sektor pertambangan dan galian yang meliputi pertambangan emas dan mineral, pasir dan kerikil, batu kapur, dan batuan.

5.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Bidang Pelayanan Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi

Guna menjawab rumusan masalah yang kedua, berikut dijelaskan bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, bidang pelayanan umum dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi melalui analisis regresi data panel menggunakan data *time series* data tahun 2017 sampai 2023 dan data *cross section* mencakup 11 kabupaten/kota Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

5.2.1 Pemilihan Model Terbaik

Penelitian ini melaksanakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan analisis regresi data panel. Saat melakukan pengestimasi data panel digunakan tiga metode, yaitu *Common Effect model (CEM)*, Metode *Fixed Effect model (FEM)*, dan Metode *Random Effect model (REM)*. Dengan menggunakan Eviews 9 berikut merupakan hasil estimasi ketiga metode tersebut:

A. Uji Chow

Dalam penentu model lebih baik digunakan diantara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect* maka dilakukan uji chow yang memperhatikan signifikan probabilita dengan uji statistic F, dimana apabila nilai probabilita F dan chi-square $> \alpha$ 0,05 maka model terbaik untuk digunakan ialah model *fixed effect*, sebaliknya jika nilai probabilita F dan *chi-square*. Berikut ini hasil uji chow yang dilakukan pengolahan dengan software *eviews* 9.

Tabel 5.4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	592.807876	(10,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	349.526915	10	0.0000

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 9, 2024

Berdasarkan hasil analisis statistic Uji Chow dan Redundant Test menunjukkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga hipotesis alternatif H_1 diterima, H_0 ditolak. Hal ini mengidentifikasi bahwa model yang tepat digunakan adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil pengujian ini, langkah selanjutnya adalah penentuan model yang tepat antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Perbandingan antara kedua model ini akan dilakukan dengan uji Hausman Test.

B. Uji Hausman

Untuk menentukan model yang tepat antara model *fixed effect* atau model *Random Effect*. Uji ini bertujuan untuk memilih model yang tepat apakah fixed effect atau random effect. Keputusan pemilihan model melihat nilai probabilita F-statistic. Jika nilai probabilita F-statistic $< 0,05$ maka model terpilih yaitu *fixed effect*, apabila nilai probabilita F-statistic $> 0,05$ maka model yang terpilih yaitu *random effect*.

Tabel 5.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	Statistic		
Cross-section random	1.535862	2	0.4640

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, diketahui nilai probabilita sebesar $> 0,05$ yaitu 0,4640. Nilai probabilitas $> 0,05$ memiliki arti model *random effect* lebih baik untuk digunakan dibandingkan menggunakan model *fixed effect*.

C. Uji Langrange Multiplier

Uji langrange multiplier ini bertujuan untuk memilih model yang tepat apakah diantara *random effect* atau *common effect*. Kriteria penilaian uji langrange multiplier, yaitu apakah probabilita *langrange multiplier* lebih kecil atau lebih besar dari signifikan 0,05. Jika LMhitung $< 0,05$ maka model yang terpilih yaitu model random effect . Apabila LMhitung $> 0,05$ maka model yang terpilih yaitu model common effect.

Tabel 5.6 Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	213.4289 (0.0000)	3.058914 (0.0803)	216.4878 (0.0000)
Honda	14.60921 (0.0000)	-1.748975 --	9.093557 (0.0000)
King-Wu	14.60921 (0.0000)	-1.748975 --	7.563589 (0.0000)
Standardized Honda	16.07075 (0.0000)	-1.532163 --	7.478621 (0.0000)

Standardized King-Wu	16.07075 (0.0000)	-1.532163 --	5.841029 (0.0000)
Gourieriou, et al.*	--	--	213.4289 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

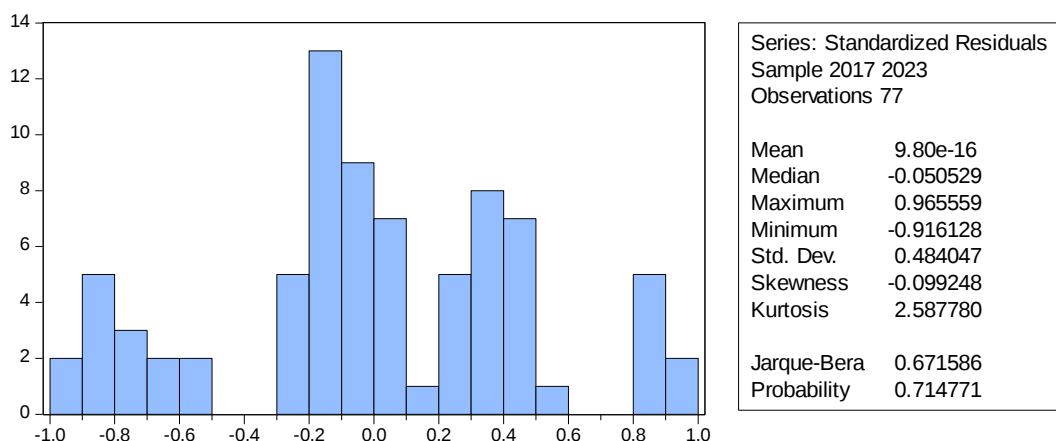
Sumber: Data diolah dengan Eviews 9,2024

Berdasarkan hasil analisis uji langrange multiplier menunjukkan nilai LMhitung sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model yang tepat digunakan adalah model random effect.

Setelah dilakukan uji chow, hausman dan langrange multiplier, maka dapat disimpulkan bahwa model random effect merupakan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

5.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah dengan Eviews 9,2024

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Sesuai dengan hasil gambar 4 menunjukkan bahwasanya terdapat nilai probabilitas 0,714771 yaitu lebih besar daripada 0,05 hingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui pada regresi ini apakah ditemukannya korelasi diantara variabel bebas. Batasan nilai koefisien korelasi person untuk mendeteksi multikolinearitas adalah $> 0,80$. Jika nilai koefisien melebihi batas tersebut, maka disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas dalam regresi. Berikut disajikan tabel hasil uji multikolinearitas.

Tabel 5.7 Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG_PPBE	LOG_PPBP
LOG_PPBE	1	0.094309
LOG_PPBP	0.094309	1

Sumber: Data diolah dengan *Eviews* 9,2024

Berdasarkan pengujian multikolinearitas tabel diatas menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Hal ini dikarenakan variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi sebesar 0,094309 dan nilai variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sebesar 0,094309. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai koefisien korelasi bernilai kurang 0,80.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu keadaan pada saat permasalahan dan gangguan tidak mempunyai variasi yang sama. Jika variasi dari residual tetap akan disebut homokedastisitas sebaliknya apabila variasi berbeda disebut heteroskedastisitas. Tujuan melakukan pembuktian dugaan dimana pada uji heteroskedastisitas, akan dilakukan uji *absolute residual* terhadap variabel bebas. Apabila probabilitas $Obs \cdot R\text{-square} > \alpha 0,05$ maka tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 5.8 Hasil Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/09/24 Time: 11:42

Sample: 2017 2023

Periods included: 7

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 77

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.780136	1.113503	1.598681	0.1142
LOG_PPBE	-0.010144	0.010300	-0.984829	0.3279
LOG_PPBP	-0.042951	0.042725	-1.005294	0.3180
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.335467	0.9801
Idiosyncratic random			0.047753	0.0199
Weighted Statistics				
R-squared	0.034475	Mean dependent var		0.020207
Adjusted R-squared	0.008380	S.D. dependent var		0.047450
S.E. of regression	0.047250	Sum squared resid		0.165212
F-statistic	1.321120	Durbin-Watson stat		1.364105
Prob(F-statistic)	0.273055			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.013516	Mean dependent var		0.376126
Sum squared resid	6.820184	Durbin-Watson stat		0.033044

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9, 2024

Berdasarkan tabel 5.8 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada masing-masing variabel independennya melebihi probabilitas yaitu $obs \cdot R\text{-Square} > \alpha$ 0,05. Dimana nilai probabilitas pengeluaran pemerintah bidang ekonomi 0,3279 dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum 0,3180 Sehingga mampu ditarik kesimpulan bahwa tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas.

5.2.3 Hasil Persamaan Regresi Data Panel REM

Model regresi data panel yaitu penggabungan diantara data deret waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*). Tujuan model regresi ini guna mengetahui terdapat atau tidak pengaruh dari variabel-variabel independent terhadap variabel dependent. Di dalam penelitian hasil analisis regresi data panel terbaik untuk digunakan yaitu model *random effect*.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel independent (bebas) yang dimasukkan pada persamaan model regresi yaitu pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum. Sehingga model regresi data panel yang berhasil di bentuk berikut:

Tabel 5.9 Analisis Regresi Data Panel Model Terbaik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.542508	1.249309	6.037343	0.0000
LOG_PPBE	0.089469	0.011502	7.778833	0.0000
LOG_PPBP	0.157622	0.047768	3.299716	0.0015

Sumber: Data diolah dengan Eviews 9, 2024

$$LOGPE_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOGPPBE_{1it} + \beta_2 LOGPPBP_{2it}$$

$$LOGPE = 7.542508 + 0,089469LOGPPBE + 0,157622LOGPPBP$$

Interpretasi dari persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

1. Nilai konstanta 7,542508 artinya, apabila variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya nol, maka nilai variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi nilainya positif sebesar 7,542508 persen.
2. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi 0,089469 hal ini memiliki arti jika pengeluaran pemerintah bidang ekonomi

meningkat satu persen, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat 0,089469 persen.

2. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum 0,157622 hal ini memiliki arti jika pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum meningkat satu persen, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi meningkat 0,157622 persen.

Berdasarkan hasil estimasi model *random effect* dapat diberikan penjelasan bahwa tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi mempunyai nilai konstanta yang berbeda. Nilai Konstanta kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.10 Nilai Konstanta Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	$C_i + C(7.542508)$
Batanghari	$-0,028913 + 7,542508 = 7,513595$
Bungo	$0,031120 + 7,542508 = 7,573628$
Kerinci	$-0,655639 + 7,542508 = 6,886869$
Merangin	$-0,222675 + 7,542508 = 7,319833$
Muaro Jambi	$0,310218 + 7,542508 = 7,852726$
Sarolangun	$-0,125275 + 7,542508 = 7,417233$
Tanjung Jabung Barat	$0,887497 + 7,542508 = 8,430005$
Tanjung Jabung Timur	$0,357164 + 7,542508 = 7,899672$
Tebo	$-0,124711 + 7,542508 = 7,417797$
Kota Jambi	$0,454277 + 7,542508 = 7,996885$
Kota Sungai Penuh	$-0,883064 + 7,542508 = 6,659444$

Sumber: Hasil data yang diolah dengan Eviews 9, 2024

Sesuai tabel nilai konstanta untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan hasil estimasi *random effect model* (REM) setiap daerah memiliki nilai yang berbeda dengan adanya perubahan dari pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum baik diantar daerah maupun pada antar waktu. Jika variabel-variabel tersebut meningkat satu persen maka pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi akan juga mengalami peningkatan. Berikut ini adalah persamaan model regresi pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi :

a) Kabupaten Batanghari

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batanghari} = 7.542508 - 0,028913 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$$

Konstanta 7,513595 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,028913 maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari terjadi penurunan sebesar 0,028913 persen.

b) Kabupaten Bungo

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo = $7.542508 + 0,031120 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,573628 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya 0,031120, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bungo terjadi peningkatan sebesar 0,031120 persen.

c) Kabupaten Kerinci

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci = $7.542508 - 0,0655639 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 6,886869 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,0655639, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci terjadi penurunan sebesar 0,0655639 persen.

d) Kabupaten Merangin

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin = $7.542508 - 0,222675 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,319833 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,222675, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin terjadi penurunan sebesar 0,222675 persen.

e) Kabupaten Muaro Jambi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muaro Jambi = $7.542508 + 0,310218 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,852726 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya 0,310218, maka dari itu

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi terjadi peningkatan sebesar 0,310218 persen.

f) Kabupaten Sarolangun

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun = $7.542508 - 0,125275 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,417233 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,125275 maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun terjadi penurunan sebesar 0,125275 persen.

g) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat = $7.542508 - 0,887497 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 8,430005 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya 0,887497, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terjadi peningkatan sebesar 0,887497 persen.

h) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur = $7.542508 + 0,357164 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,899672 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya 0,357164, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi peningkatan sebesar 0,357164 persen.

i) Kabupaten Tebo

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo = $7.542508 - 0,124711 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$

Konstanta 7,417797 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,124711, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tebo terjadi penurunan sebesar 0,124711 persen.

j) Kota Jambi

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi} = 7.542508 + 0,454277 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$$

Konstanta 7,996885 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya 0,454277, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Jambi terjadi peningkatan sebesar 0,454277 persen.

k) Kota Sungai Penuh

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh} = 7,542508 - 0,883064 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$$

Konstanta 6,659444 menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum nilainya -0,883064, maka dari itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sungai Penuh terjadi penurunan sebesar 0,883064 persen.

Dari hasil persamaan regresi antar *cross section* 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, ditemukan bahwa terdapat 5 dari 11 kabupaten/kota yang menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan nilai konstanta Provinsi Jambi. Dapat diartikan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki pengaruh positif yang lebih besar, diantaranya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Muaro Jambi, dan Bungo. Disisi lain terdapat 4 kabupaten/kota yang menunjukkan pengaruh kurang baik dibandingkan dengan nilai konstanta di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Batanghari, Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Sungai Penuh yang mengalami penurunan nilai konstanta pada setiap kabupaten/kota tersebut.

5.3.3.1 Uji Signifikansi (Uji F)

Guna melihat pengaruh dari variabel bebas dengan bersamaan kepada variabel terikat, dilaksanakan pengujian uji F-statistic. Didasarkan hasil regresi mempergunakan model *random effect* yang sebagai model terpilih didapatkan nilai F-hitung yakni 44,44266 dengan tingkatan signifikansi 0,000000. Pada α 0,05 dan ketentuan k (variabel bebas) dan n (jumlah observasi) diperoleh nilai $df_1 = k-1$ ($2-1 = 1$) dan $df_2 = n-k$ ($77-2 = 75$), diperoleh F tabel sebesar 3,120349

dengan signifikansi 0,05. Dengan itu maka $F_{hitung} = 44,44266 > F_{tabel} = 3,120349$ signifikansi $0,000000 < 0,05$. Berdasarkan perbandingan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat diambil simpulan menolak H_0 , yang memiliki arti variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

5.3.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Dilakukan uji t bertujuan guna memeriksa pengaruh variabel-variabel bebas secara individu terhadap variabel dependent (terikat). Uji t-statistik ini dilaksanakan yakni melaksanakan perbandingan diantara t-hitung dengan nilai t-tabel pada ketentuan $\alpha 0,05$.

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi (PPBE)

Didasarkan hasil regresi model *random effect* sebagai model yang terpilih, t-hitung untuk pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ekonomi yang didapatkan yakni 7,778833 dengan signifikansi 0,0000. Berdasarkan tingkat $\alpha 0,05$ dengan $df = n-k$ ($77-2 = 75$), diperoleh nilai t-tabel = 1,99210 dengan signifikansi 0,05. Oleh itu maka dapat diberi simpulan bahwasannya nilai t-hitung = 7,778833 $>$ t-tabel = 1,99210 serta signifikansi $0,0000 < 0,05$, dengan ini mendapat kesimpulan H_0 ditolak dan menerima H_1 , berarti pengeluaran pemerintah bidang ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum (PPBPU)

Didasarkan hasil regresi model *random effect* sebagai model yang terpilih, t-hitung untuk pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum yang didapatkan yaitu 3,299716 dengan signifikansi 0,0015. Berdasarkan tingkat $\alpha 0,05$ dengan $df = n-k$ ($77-2 = 75$), diperoleh nilai t-tabel = 1,99210 dengan signifikansi 0,05. Oleh itu maka dapat diberi simpulan bahwasannya nilai t-hitung = 3,299716 $>$ t-tabel = 1,99210 serta signifikansi $0,0015 < 0,05$, dengan ini mendapat kesimpulan H_0 ditolak dan menerima H_1 , berarti pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

5.3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilaksanakan guna pengukuran tingkat tepat atau cocoknya regresi data panel, yakni proporsi presentasi sumbangan PPBE, PPBPU terhadap variasi PE. Nilai R^2 yang makin dekat 1 artinya variabel-variabel bebas makin bisa untuk menjelaskan variasi pada variabel terikat. Pada model *random effect* menunjukkan nilai uji koefisien determinasi (*R-squared*) yakni 0,545693 dari hasil inilah dapat dinyatakan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum 54,56% dan sisanya 45,44% dijelaskan dengan variabel lain yang tak termasuk dalam penelitian. Dari nilai *R-squared* sebesar 0,545693 dapat dikatakan variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil uji estimasi data, maka model terbaik yang digunakan yaitu model *random effect* dengan hasil regresi sebagai berikut:

$$\text{LOGPE} = 7.542508 + 0,089469\text{LOGPPBE} + 0,157622\text{LOGPPBPU}$$

5.2.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

Dari hasil estimasi diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki koefisien bernilai positif yaitu sebesar 0,089469 dimana jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,089469 persen dan variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki probabilitas sebesar $0,00000 < 0,05$ yang memiliki arti variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana umum, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran ini ditunjukan agar mempunyai pengaruh langsung terhadap

kesejahteraan masyarakat sekaligus *multiplier effect* yang besar. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Tingkat daya beli masyarakat pada suatu wilayah merupakan cerminan dari pendapatan perkapita, dimana apabila semakin besar pendapatan yang didapat maka makin besar pula pengeluaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Keynes menurutnya pengeluaran pemerintah yang relatif besar akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan agregat dan setelah itu gilirannya akan memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan hasil pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah bidang ekonomi memiliki nilai yang positif.

Hal ini memperkuat anggapan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dapat memberikan kontribusi yang pasti terhadap kinerja ekonomi daerah dan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dikarenakan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ini hampir pada seluruh bidang cenderung berupa investasi dimana dampak investasi tersebut baru akan dapat dilihat pada jangka panjang meliputi belanja untuk membangun fasilitas dan prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, irigasi, dan memberikan subsidi. Terdapat pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi khususnya akibat pandemic Covid-19. Dimana pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ini tersebar dan dilaksanakan oleh beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas ini, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi perlu dilakukan dengan strategi prioritas pembangunan yang tepat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hasil penelitian ini sesuai dengan (Tasmilah, 2022) menyatakan bahwa belanja pemerintah menurut bidang ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif memiliki arti bahwa pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ini memberikan kontribusi dalam peningkatan

perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atas pendapatan, oleh karena itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5.2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

Dari hasil estimasi diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah biddang pelayanan umum memiliki koefisien bernilai positif yaitu sebesar 0,157622 dimana jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum maka dapat terjadi juga peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 0,157622 persen. Nilai probabilita pada variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum ini yaitu sebesar $0,0015 < 0,05$ yang mempunyai arti bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terjadi hubungan yang positif diantara pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum dalam penelitian ini, hal tersebut dikarenakan pemerintah mampu merealisasikan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi belanja bidang pelayanan umum dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu mengamanatkan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan umum. Dengan itu diketahui bahwa secara signifikan variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi dan pemerintah daerah telah mengupayakan dengan baik untuk penyediaan pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian variabel pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hasil penelitian ini sesuai dengan Wahyuningrum & Juliprijanto, (2022) menyatakan bahwa belanja pemerintah di sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh positif ini memiliki arti bahwa pengeluaran atau belanja sektor publik memberikan kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

5.2.5 Implikasi Kebijakan

Apabila dilihat berdasarkan perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan pelayanan umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada pengeluaran pemerintah bidang ekonomi diperlukan untuk mengalokasikan belanja ekonomi kepada peningkatan nilai tambah ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yang kemudian hal ini akan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas dan kualitas serta kelembagaan sarana dan prasarana, dengan ditingkatkan belanja ekonomi ini dapat meningkatkan nilai tambah pada industri pengolahan, serta dapat meningkatkan nilai tambah jasa produktif dan akan mengembangkan perekonomian daerah. Dengan adanya pengeluaran pemerintah bidang ekonomi ini juga dapat dilaksanakan pemantapan ketahanan pangan dan juga pengelolaan energi dan sumber daya alam berkelanjutan, yang nantinya hasil dari belanja yang diberikan akan meningkatkan teknologi untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan yang nantinya akan membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan besarnya pengeluaran bidang pelayanan umum ini tentunya pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokuskan untuk mengejar output saja, pemerintah juga harus memperhatikan hal-hal mendasar pada bidang pelayanan umum, seperti memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat maupun pihak swasta untuk pembayaran gaji, akses layanan dan perizinan, kemudahan informasi dan belanja operasional kebutuhan perkantoran sehari-hari. Selain itu pemerintah juga dapat menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kebutuhan daerah sehingga layanan umum dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh kalangan masyarakat daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sampai 2023 diperoleh kesimpulan, yaitu antara lain:

1. Perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana dengan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017 sampai 2023 sebesar 31,30 persen dan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah bidang pelayanan umum kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023 sebesar 13,60 persen.
2. Dapat disimpulkan bahwasanya variabel pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2017-2023.

6.2 Saran

Didasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan, yaitu antara lain:

1. Bagi pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum pada kegiatan-kegiatan yang dapat secara langsung maupun tidak langsung manfaatnya dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas guna meningkatkan dukungan dan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi, melalui pengeluaran pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatan serta pembangunan di seluruh

bidang ekonomi yang memiliki kualitas dalam merangsang produktivitas kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema serupa diharapkan untuk mencari variabel-variabel lain sehingga dapat diketahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan jumlah sampel, memperluas wilayah penelitian, serta menambahkan periode penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih baik dibandingkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). *Pengaruh pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi jawa barat*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5603>
- Ahmad, H., Rajab, A., & Malik, M. M. (2023). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan insfrastruktur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 19(3), 689–701. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/13670>
- Al-tamimi, K. A. M. O. H. D. (2020). *Government Spending as a Tool for Economic Growth in the Economy of Jordan*. 17, 769–774. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.75>
- Babatunde, S. A. (2018). Government spending on infrastructure and economic growth in Nigeria. *Economic Research-Ekonomiska Istraživanja*, 31(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1436453>
- Badan Pusat Statistik, P. J. (2023). *Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi 2018-2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. <https://jambi.bps.go.id/publication/2023/10/18/b378a2407863d45419046d1a/tinjauan-ekonomi-kabupaten-kota-se-provinsi-jambi-2018-2022.html>
- Bawinti, I., Kawung, G. M. V, & Luntungan, A. Y. (2018). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud*. 18(04), 23–33. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/20878>
- Dudzeviciute, G. (2023). *Dependence of economic growth on government expenditure by function in the Baltic states*. 16, 9–22. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2023/16-1/1>
- Fair, C. E. K. dan. (2015). *Prinsi-prinsip Ekonomi*. Erlangga.
- Fransisco, Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2019). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ipm Di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1–13. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v8i2.24816
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep , dan Aplikasi Dengan EVIEWS 10*. Badan Penerbit Universitas di Ponegoro.
- Ginting, A. M. (2018). *Pengaruh Belanja Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 63–74.
- Hasan, M., & Muhammad, A. (2018). 1| *Pembangunan Ekonomi*. [http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku pembangunan ekonomi contoh fix.pdf](http://eprints.unm.ac.id/10706/1/Buku%20pembangunan%20ekonomi%20contoh%20fix.pdf)

- Jhingan, M. . (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Alih Bahasa: D. Gurutno). Rajawali Pers.
- Kesia Dumais, J., Christina Rotinsulu, D., & Sumual, J. I. (2022). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupatenminahasa Utara. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22, 37–48. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/42449/37481>
- Lubis Effendy. (2014). *Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerjaan dan Pengeluaran Pemerintah Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 4 (2), 189. <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/7544/6520>
- Mangkoesoebroto, G. (2018). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. BPFE UGM.
- Marta Pascual, Santiago Alvarez-Garcia, D. R. (2017). *Government expenditure and economic growth in the European Union countries: New evidence*. 36(36), 127–133. <http://dx.doi.org/10.1108/IJSE-12-2016-0365>
- Muhammed, A. (2014). Government Spending for Economic Growth in Ethiopia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(9), 66–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/234646396.pdf>
- Nartea, G., & Hernandez, J. (2020). *Government Size , the Composition of Public Spending and Economic Growth in Netherland*. 9(2), 82–89. <https://doi.org/10.20448/2002.92.82.89>
- Popescu, C. C., & Maxim, L. D. (2021). *Government Spending and Economic Growth : A Cointegration Analysis on Romania*. <https://doi.org/10.3390/su13126575>
- Putri, R. A., & Selamat, R. (2021). *Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi*. 10(2), 107–122. <https://online-journal.unja.ac.id/pdpd/article/download/12858/11964/42022>
- Rauf Dedy Abdur. (2017). *Pengaruh Belanja Modal Dan Penyertaan Modal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Study Kasus di Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur)*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3681>
- Ridwan Fadhil Muhammad, N. S. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Pustaka Pelajar. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/721/1/Ekonomi publik.print.2 \(2\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/721/1/Ekonomi publik.print.2 (2).pdf)
- Sri Hartati, Y. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.74>

- Suhada Imam Deksa, Dessy Rahmadani, Masnum Rambe, Maulana Abdul Fattah, Putri Fadillah Hasibuan, Salsabilla Siagian, S. W. (2022). Efektivitas Para Pelaku Ekonomi Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/1315/1024>
- Sukirno, Sadono. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Persada.
- Sukirno Sadono. (2011). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Pranada Media Grup.
- Sukirno Sadono. (2016). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Ed.Kedua). Kencana.
- Sukirno Sadono. (2019). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Vol. 25). PT Raja Grafindo Persada .
- Tasmilah, T. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i2.7220>
- Todaro Michel P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Terjemahan. Edisi Kedelapan. Jilid 1*. Erlangga.
- Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (2022). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 2(6), 189–204. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/270>
- Yayat, R. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 56–65. <http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf>
- Yuliana, Y., Adamy, Y., Danerlly, D., & Faqroni, F. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi Dan Fungsi Pelayanan Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v7i1.3946>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten/kota	PDRB Seri 2010 ADHK Per Kabupaten/Kota (Miliar)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Batanghari	10.634,36	11.147,66	11.697,11	11.666,11	12.227,81	13.728,25	14.236,04
Bungo	11.520,10	12.045,80	12.549,93	12.490,07	13.113,86	13.733,86	14.236,04
Kerinci	5.784,49	6.069,60	6.326,54	6.567,28	6.822,79	7.125,04	7.533,40
Merangin	8.947,14	9.388,24	9.787,46	9.863,64	10.380,35	10.973,71	11.553,48
Muaro Jambi	14.655,06	15.389,57	16.126,72	16.183,86	16.825,15	18.179,03	19.320,92
Sarolangun	9.808,65	10.279,95	10.717,75	10.690,59	11.396,95	12.163,86	12.625,52
Tanjung Jabung Barat	27.421,79	29.279,46	30.744,99	30.654,42	31.072,19	31.866,62	32.984,75
Tanjung Jabung Timur	16.748,26	17.241,20	17.967,72	17.349,98	17.373,51	17.471,92	17.850,36
Tebo	9.239,25	9.699,61	10.160,98	10.158,23	10.593,96	11.260,59	11.767,26
Kota Jambi	17.728,34	18.667,87	19.550,81	18.721,13	19.494,09	20.543,22	21.901,35
Sungai Penuh	4.183,87	4.388,18	4.607,81	4.600,23	4.768,84	4.980,47	5.225,32

Lampiran 2. Data Penelitian Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi

PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG EKONOMI								
TAHUN 2017 - 2023								
No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Batanghari	65.685.088.163	67.959.975.226	74.598.732.203	82.479.503.912	54.117.147.494	202.021.541.949	290.561.008.341
2	Bungo	63.451.978.480	67.884.290.036	75.186.528.608	82.123.296.867	124.596.991.178	137.071.240.471	132.973.741.680
3	Kerinci	82.808.503.304	71.510.769.779	95.455.784.442	85.999.711.084	66.730.764.325	174.872.425.863	187.622.767.893
4	Merangin	62.822.499.764	62.636.988.977	77.141.196.132	69.920.961.083	301.081.076.119	94.165.625.528	162.934.352.545
5	Muaro Jambi	52.303.329.136	49.651.987.437	64.905.958.847	66.014.981.145	51.082.779.540	208.697.171.371	184.996.261.057
6	Sarolangun	132.527.119.500	136.676.628.756	171.072.436.117	161.971.217.949	145.490.223.753	170.479.415.623	192.479.498.317
7	Tanjab Barat	72.580.888.162	72.907.208.069	85.023.593.740	82.280.948.716	60.833.701.879	318.514.789.637	233.058.679.793
8	Tanjab Timur	118.220.592.668	122.939.196.289	117.702.851.448	107.936.397.692	54.622.673.925	307.912.757.554	256.806.592.645
9	Tebo	37.827.196.571	37.634.106.915	46.071.604.926	41.802.591.501	169.225.539.892	347.982.152.394	168.304.808.926
10	Kota Jambi	88.950.184.830	86.495.999.620	95.841.354.669	95.078.020.091	75.174.335.222	305.399.091.994	331.715.771.377
11	Sungai Penuh	48.089.052.868	52.295.811.282	61.395.286.778	54.228.835.059	181.357.015.646	135.179.709.992	150.954.326.907

Lampiran 3. Data Pengeluaran Pemerintah Bidang Pelayanan Umum

PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PELAYANAN UMUM								
TAHUN 2017 - 2023								
No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Batanghari	410.561.869.043	423.448.373.728	482.528.359.003,01	524.020.271.093	434.562.805.714,85	442.845.958.086	469.382.079.300
2	Bungo	374.943.649.870	413.032.248.387	431.347.431.763,28	753.316.760.200	368.931.152.265,00	409.001.796.760	456.287.139.800
3	Kerinci	441.239.273.679	570.642.554.553	546.792.164.534,54	501.699.298.826	435.748.281.268,00	480.241.083.849	499.768.439.632
4	Merangin	466.681.750.423	455.956.066.072	500.443.217.399,34	498.500.013.835	478.584.170.360,36	468.102.898.530	491.201.603.266
5	Muaro Jambi	383.935.199.086	381.627.953.776	474.104.176.530,63	484.257.726.030	377.556.133.491,09	442.696.456.026	491.679.893.579
6	Sarolangun	283.043.353.741	272.790.938.130	332.333.954.684,00	325.715.504.618	386.207.441.493,00	499.500.629.475	447.366.749.679
7	Tanjab Barat	383.060.270.863	398.356.576.286	488.429.356.239,57	517.402.595.794	422.698.445.368,48	447.847.680.353	471.368.925.570
8	Tanjab Timur	271.573.557.806	299.663.333.518	333.075.951.934,40	392.864.217.584	300.209.015.018,00	339.164.241.815	350.982.361.382
9	Tebo	303.490.140.613	316.613.854.825	350.516.049.151,32	376.315.236.129	325.847.054.042,60	353.884.911.626	368.249.526.907
10	Kota Jambi	303.516.070.963	328.852.532.727	388.196.947.228,00	420.112.187.083	336.606.214.196,99	384.902.562.167	421.073.077.804
11	Sungai Penuh	207.451.466.067	229.455.222.400	271.612.295.066,52	313.679.426.121	238.428.574.783,24	312.036.251.956	284.686.338.129

Lampiran 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	592.807876	(10,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	349.526915	10	0.0000

Lampiran 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.535862	2	0.4640

Lampiran 6. Hasil Uji Langrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

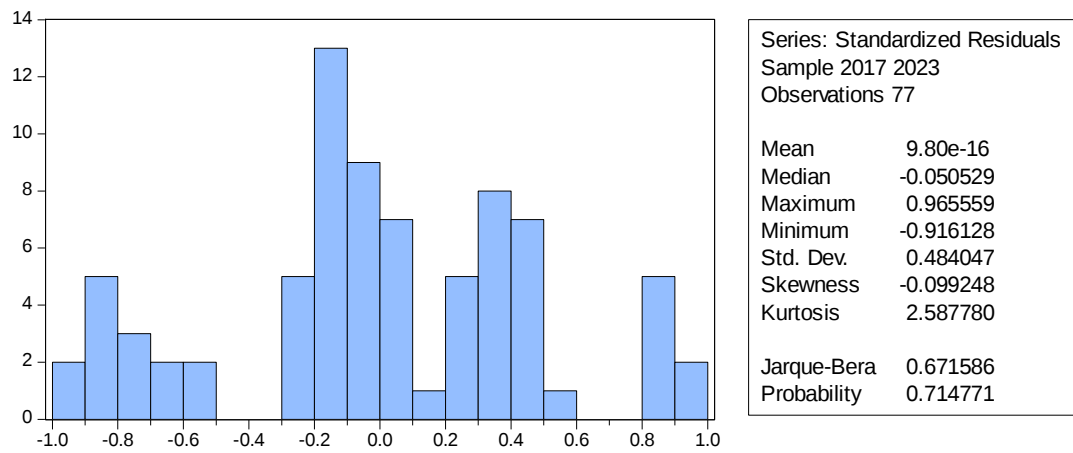
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	213.4289 (0.0000)	3.058914 (0.0803)	216.4878 (0.0000)
Honda	14.60921 (0.0000)	-1.748975 --	9.093557 (0.0000)
King-Wu	14.60921 (0.0000)	-1.748975 --	7.563589 (0.0000)
Standardized Honda	16.07075 (0.0000)	-1.532163 --	7.478621 (0.0000)
Standardized King-Wu	16.07075 (0.0000)	-1.532163 --	5.841029 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	213.4289 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Lampiran 7. Uji Normalitas



Lampiran 8. Uji Multikolinearitas

	LOG_PPBE	LOG_PPBPUPU
LOG_PPBE	1	0.094309
LOG_PPBPUPU	0.094309	1

Lampiran 8. Uji Hateroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/09/24 Time: 11:42

Sample: 2017 2023

Periods included: 7

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 77

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.780136	1.113503	1.598681	0.1142
LOG_PPBE	-0.010144	0.010300	-0.984829	0.3279
LOG_PPBP	-0.042951	0.042725	-1.005294	0.3180
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.335467	0.9801
Idiosyncratic random			0.047753	0.0199
Weighted Statistics				
R-squared	0.034475	Mean dependent var		0.020207
Adjusted R-squared	0.008380	S.D. dependent var		0.047450
S.E. of regression	0.047250	Sum squared resid		0.165212
F-statistic	1.321120	Durbin-Watson stat		1.364105
Prob(F-statistic)	0.273055			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.013516	Mean dependent var		0.376126
Sum squared resid	6.820184	Durbin-Watson stat		0.033044

Lampiran 9. Hasil Regresi *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: LOG_PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/24 Time: 12:25

Sample: 1 7

Included observations: 7

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 77

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.506138	6.635247	-0.679121	0.4992
LOG_PPBE?	0.161605	0.094629	1.707773	0.0919
LOG_PPBP?	0.540382	0.240324	2.248555	0.0275
R-squared	0.106009	Mean dependent var	14.02010	
Adjusted R-squared	0.081847	S.D. dependent var	0.500646	
S.E. of regression	0.479721	Akaike info criterion	1.406957	
Sum squared resid	17.02978	Schwarz criterion	1.498274	
Log likelihood	-51.16785	Hannan-Quinn criter.	1.443483	
F-statistic	4.387419	Durbin-Watson stat	0.074930	
Prob(F-statistic)	0.015825			

Lampiran 10. Hasil Regresi *FIXED Effect Model (FEM)*

Dependent Variable: LOG_PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/09/24 Time: 12:26

Sample: 1 7

Included observations: 7

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 77

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.592783	1.241646	6.115094	0.0000
LOG_PPBE?	0.089421	0.011504	7.772905	0.0000
LOG_PPBP?	0.155784	0.047850	3.255695	0.0018
Fixed Effects (Cross)				
BATANGHARI--C	-0.028696			
BUNGO--C	0.031390			
KERINCI--C	-0.656230			
KOTAJAMBI--C	0.454857			
MERANGIN--C	-0.222655			
MUAROJAMBI--C	0.310852			
SAROLANGUN--C	-0.125633			
SUNGAIPENUH--C	-0.885176			
TANJABBARAT--C	0.889091			
TANJABTIMUR--C	0.357374			
TEBO--C	-0.125175			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.990451	Mean dependent var	14.02010	
Adjusted R-squared	0.988661	S.D. dependent var	0.500646	
S.E. of regression	0.053311	Akaike info criterion	-2.872613	
Sum squared resid	0.181891	Schwarz criterion	-2.476906	
Log likelihood	123.5956	Hannan-Quinn criter.	-2.714334	
F-statistic	553.2177	Durbin-Watson stat	1.529476	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 10. Hasil Regresi *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: LOG_PE?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/09/24 Time: 12:27

Sample: 1 7

Included observations: 7

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 77

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.542508	1.249309	6.037343	0.0000
LOG_PPBE?	0.089469	0.011502	7.778833	0.0000
LOG_PPBPUP?	0.157622	0.047768	3.299716	0.0015
Random Effects (Cross)				
BATANGHARI--C	-0.028913			
BUNGO--C	0.031120			
KERINCI--C	-0.655639			
KOTAJAMBI--C	0.454277			
MERANGIN--C	-0.222675			
MUAROJAMBI--C	0.310218			
SAROLANGUN--C	-0.125275			
SUNGAIPENUH—				
C	-0.883064			
TANJABBARAT—				
C	0.887497			
TANJABTIMUR--C	0.357164			
TEBO--C	-0.124711			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.513498	0.9893
Idiosyncratic random			0.053311	0.0107
Weighted Statistics				
R-squared	0.545693	Mean dependent var	0.549724	
Adjusted R-squared	0.533414	S.D. dependent var	0.077801	
S.E. of regression	0.053143	Sum squared resid	0.208992	
F-statistic	44.44266	Durbin-Watson stat	1.337523	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				